



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI VIII DPR RI
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama Republik Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 2 September 2021
Waktu	: 10.14- 12.33 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Acara	: Pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2022
Ketua Rapat	: H. Yandri Susanto, S.Pt (F-PAN)
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Hadir	: 45 anggota dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI
Anggota yang Hadir	: PIMPINAN: <ol style="list-style-type: none">1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F/PAN)2. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily. M.Si. (F-PG)4. H. Marwan Dasopang (F.PKB) ANGGOTA: FRAKSI PDI PERJUANGAN <ol style="list-style-type: none">5. I Komang Koheri, S.E.6. Paryono, S.H., M.H.

7. Drs. Samsu Niang, M.Pd.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

8. H. John Kenedy Azis, S.H.

9. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag.,
S.H., M.H.

10. Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M.

11. Muhammad Ali Ridha.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

12. M. Husni, S.E., M.M.

13. Dr. H. Jeffry Romdonny, S.E.,
S.Sos., M.Si., M.M

**FRAKSI PARTAI NASIONAL
DEMOKRAT**

14. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr.

15. Hj. Sri Wulan, M.M.

16. H. Rudi Hartono Bangun, S.E.,
M.A.P.

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA**

17. MF. Nurhuda Y.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

18. H. Hasani Bin Zuber. S.IP.

19. Wastam, S.E., S.H.

**FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA**

20. K.H. Bukhori, Lc., M.A.

21. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.

22. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A., M.A.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

23. H. Muhammad Rizal, S.H., M.Si.

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN**

-

Anggota Izin

: 1. H. Nasril Bahar, S.E (F-PAN)

Undangan

: Menteri Agama Republik Indonesia
beserta Jajaran Kementerian Agama
Republik Indonesia.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat dan yang kami banggakan Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VIII beserta seluruh anggota Komisi VIII, baik yang mengikuti secara fisik dalam ruang Komisi VIII maupun yang mengikuti secara virtual.

Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya kita semua bisa mengikuti agenda yang sangat penting pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, sebelum kita memulai semua rangkaian rapat kerja pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. Selesai.

BERDOA : MULAI
BERDOA : SELESAI

Pak Menteri yang saya hormati,

Para Pimpinan dan Anggota, hadirin yang berbahagia.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara Rapat-rapat di DPR Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi DPR tanggal 13 Juli 2021 dan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII tanggal 18 Agustus 2021, maka pada hari ini, Kamis tanggal 2 September 2021 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan Rapat Kerja bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pembahasan RKA K/L tahun 2022.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat Komisi VIII, *alhamdulillah* sudah dihadiri oleh 13 anggota di ruangan ini dan secara virtual 32 anggota, dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR Nomor 1 Tahun 2020 dan Tata Tertib Pasal 254 ayat(5), kuorum sudah tercapai dan berdasarkan petunjuk Pimpinan DPR karena masih ada pandemi, kehadiran secara fisik tetap kita batasi. Oleh karena itu izin Pak Menteri Agama, pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII, izinkan kami membuka rapat kerja ini dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, rapat ini saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA : PUKUL 10.14 WIB.)

Baik, agenda rapat pada hari ini yang pertama, pengantar pimpinan rapat; Yang kedua, penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia terhadap agenda hari ini; Yang ketiga, tanya jawab atau respon dari anggota; Yang keempat, kesimpulan; Yang kelima penutup.

Oleh karena itu apakah 5 agenda yang saya bacakan tadi bisa disetujui? Setuju ya.

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita mulai rapat mulai pukul 10.20. Kita akhiri jam 12.00. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Pak Menteri yang saya hormati, para anggota dan pimpinan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau Undang-Undang MD3 sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atau Undang-Undang MD3 Pasal 98 ayat (2) huruf c, disebutkan bahwa tugas komisi di bidang anggaran adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi.

Rapat Kerja hari ini memiliki makna strategis karena membahas rencana kerja dan rencana anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 pada fungsi agama dan pendidikan, keagamaan sebagai tupoksi utama Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu perubahan pembahasan RKA K/L tahun 2022 masih di tengah pandemi COVID-19 sehingga postur anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 diprioritaskan untuk ikut menangani dampak pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun anggaran 2022 memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp66.497.274.699.000 mengalami penurunan sebesar Rp44.066.213.000. Komisi VIII DPR RI sangat berharap kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menjalankan tupoksinya untuk terus meningkatkan kualitas capaian penggunaan anggaran, sehingga kinerja kementerian yang menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai keagamaan, sebagai pondasi dari

pembangunan Indonesia lebih optimal dan dapat dibanggakan. Lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia harus menjadi motor pembangunan Indonesia yang menghasilkan generasi-generasi bangsa yang cakap dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan memiliki akhlak dan budi pekerti yang mulia.

Aspek pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di tahun 2022 harus menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Baik pengawasan internal maupun melalui kerja sama dengan lembaga eksternal. Diperlukan penguatan aspek anggaran untuk memperkuat program pengawasan. Hal ini disebabkan cakupan wilayah pengawasan di satuan kerja, di lingkungan Kementerian Agama sangat luas dan tersebar di kantor-kantor Kementerian Agama di seluruh provinsi. Kantor-kantor agama di seluruh kabupaten/kota, PTKIN, PTKIS, Madrasah, OPT Asrama Haji, dan juga satuan kerja lain di 34 provinsi serta di 512 kabupaten/kota.

Tentu kita juga banyak persoalan di Kementerian Agama yang terus kita dorong Pak Menteri, terakhir kita Rapat Gabungan dengan Menteri Keuangan kita minta supaya moratorium pembangunan gedung itu kita minta dikecualikan untuk Kementerian Agama. Karena kita tahu pemekaran daerah, kemudian gedung-gedung yang sudah sangat lama, yang sudah tidak layak, sementara pelayanan agama ini hampir 24 jam tidak pernah istirahat. Oleh karena itu kita tetap akan mendorong Kementerian Agama atau Kementerian Keuangan untuk mencabut. Pengecualian Kementerian Agama diperbolehkan untuk membangun gedung untuk meningkatkan pelayanan di berbagai daerah.

Kemudian yang lain kita berharap terus kepada semua pihak di negeri ini untuk sama-sama menangani pandemi COVID-19 ini karena harapan kita gerakan lebih ini kita tangani secara bersama-sama, tidak ada tempat untuk saling menyalahkan, tapi kita harus saling bersatu padu untuk terus berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara, dengan harapan di tahun 2022 Pak Menteri pelaksanaan ibadah haji bisa terlaksana Pak. Oleh karena itu kami yakin Kementerian Agama melalui Dirjen Haji, khususnya nanti akan membuat rancang bangun sehingga tidak ada lagi persoalan transisi persiapan maupun pelaksanaan di tahun 2022. Walaupun memang pelaksanaan haji ini tidak bisa berdiri sendiri di tengah pandemi. Oleh karena itu kita berharap kerja sama dengan pihak-pihak lain, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan lain sebagainya menjadi faktor utama sehingga *insya Allah* pelaksanaan haji tahun 2022 tidak ada halangan dan rintangan kembali.

Oleh karena itu dalam rapat kerja pada hari ini ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi pada Menteri Agama:

Yang pertama, apa saja rencana program kerja dan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 dan dialokasikan untuk program prioritas apa saja?

Yang kedua, bagaimana cara menggerakkan dan mengontrol kegiatan yang hendak dicapai pada program dan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2022 yang dapat diukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif?

Yang ketiga, apakah terdapat kegiatan atau program inisiatif baru di tahun 2022 khususnya yang terkait dengan penanganan dampak pandemi COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama?

Yang terakhir, langkah apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluh agama di KUA agar dapat mengangkat seluruh lapisan masyarakat atau menjangkau seluruh lapisan masyarakat? Dan tentu hasil rapat yang kemarin terakhir yaitu di-*refocussing* Komisi VIII juga akan mendorong untuk ada semacam proporsional anggaran antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Saya kira itu Pak Menteri, kami persilakan Pak Menteri Agama Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya. Setelah itu kita akan beri kesempatan pada para anggota, termasuk dari meja pimpinan untuk merespons apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama.

Pada Pak Menteri Agama kami persilakan.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL QOUMAS):

Terima kasih Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Omswastuyastu

Namo budaya

Salam kebajikan

Alhamdulillahirabilalamin. Assalatuwassalamuala asrafilambiyai walmursalin. Sayyidina wamaulana muhammadin waalaalihi wasahbihiajmain. Ammabad.

Yang terhormat yang mulia yang kami cintai Ketua Komisi VIII DPR RI sahabat Yandri Susanto dan senior saya sahabat H. Marwan Dasopang, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Yang terhormat serta Bapak/Ibu sekalian anggota Komisi VIII yang terhormat.

Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. hanya karena taufik dan hidayah-Nya kita semua bisa melaksanakan rapat kerja pada pagi hari ini dalam keadaan sehat

walafiat untuk membahas RKA K/L Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam undangan Pimpinan DPR RI Nomor AD/10996/DPRRI/8/2021 tertanggal 30 Agustus 2021 tentang Undangan Rapat Kerja.

Dalam kesempatan yang baik ini Bapak/Ibu yang terhormat, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan khususnya dan anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian terhadap kinerja Kementerian Agama dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Kementerian Agama dalam rangka rencana pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional bidang agama.

Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan paparan sesuai dengan agenda rapat hari ini yaitu pembahasan RKA K/L Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

Pertama, tentang Pagu Anggaran Tahun 2022. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana dalam RPJMNTahun 2020-2024 dan RENSTRA Kementerian Agama Tahun 2020-2024, Kementerian Agama pada tahun 2022 memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp66.453.208.486.000.

Besaran Pagu tersebut sesuai surat bersama Menteri Keuangan Nomor S634/MK.02/2021 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor D516/MPPN/D8/KU01.01/07/2021 tertanggal 23 Juli 2021 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2022.

Pagu Anggaran Kementerian Agama Tahun 2022 sebagaimana tersebut tadi mengalami penurunan sebesar Rp44.066.213.000 atau sebesar 0,07% bila dibandingkan dengan Pagu Indikatif Kementerian Agama Tahun 2022 sebesar Rp66.497.274.699.000. Penurunan ini terjadi karena penyusunan target pendapatan BNPB dan BLU, baik pada anggaran fungsi agama yaitu pentashikan Alquran dan asrama haji maupun pada anggaran fungsi pendidikan.

Berikut besaran Pagu Anggaran Kementerian Agama Tahun 2022 berdasarkan fungsi sumber dana program unit dan kerja belanja yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama:

Pertama, Pagu Anggaran Tahun 2022 berdasarkan fungsi. Pagu Anggaran Kementerian Agama tahun 2022 akan dimanfaatkan untuk

membiyai berbagai program dan kegiatan yang tercakup dalam dua fungsi, yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan, dengan besaran masing-masing anggaran sebagaimana tertuang dalam table I, tabel tersebut menunjukkan Pagu Anggaran Tahun 2022 untuk anggaran fungsi agama adalah sebesar Rp10.598.557.790.000. Anggaran fungsi agama ini merupakan anggaran belanja yang dimanfaatkan Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya yaitu pembangunan nasional bidang agama. Antara lain untuk peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial, penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, dan peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan, serta kegiatan dukungan manajemen penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan fungsi agama.

Adapun anggaran fungsi pendidikan pada Pagu Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar Rp55.854.650.696.000. Anggaran fungsi pendidikan ini digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama yang terkait dengan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan serta meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan daya saing lembaga pendidikan tinggi keagamaan.

Yang kedua, Pagu Anggaran Tahun 2022 berdasarkan sumber dana. Besaran pagu anggaran sebagaimana tersebut di atas berasal dari beberapa sumber pendanaan, yaitu rupiah murni, rupiah murni pendamping, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Badan Layanan Umum, Pinjaman Luar Negeri, dan Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Adapun rincian Pagu Anggaran berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada tabel nomor 2. Tabel tersebut menggambarkan bahwa sumber dana terbesar yang digunakan untuk membiayai layanan agama dan pendidikan agama oleh Kementerian Agama bersumber pada Rupiah Murni sebesar Rp58.675.198.137.000 atau sekitar 88,3% dari total Pagu Anggaran Tahun 2022.

Sumber dana selanjutnya rupiah murni pendamping yang akan digunakan secara umum untuk peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan serta manajemen pengelolaan dana BLU. Sumber dana berikutnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari KUA yaitu dari biaya pencatatan nikah, layanan pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan negeri, layanan asrama haji dan layanan pentaskhian pada lajnah pentaskhian mushaf Alquran. BLU sebagai sumber dana berikutnya, diperoleh dari pendapatan layanan pendidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berstatus BLU dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sedangkan sumber dana Pinjaman Luar Negeri, tercatat sebesar Rp795.155.250.000 ini digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas madrasah dan perguruan tinggi keagamaan negeri.

Adapun sumber dana terakhir berasal dari SBSN dengan nilai sebesar Rp2.830.000.997.000 yang ini nanti digunakan untuk pembiayaan pembangunan balai nikah dan manasik haji, revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pengembangan pusat layanan haji terpadu kabupaten/kota dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana madrasah negeri dan perguruan tinggi keagamaan negeri.

Ketiga, Pagu Anggaran Tahun 2022 berdasarkan program, dalam rangka mencapai sasaran strategis yaitu yang telah ditetapkan Kementerian, Mohon maaf ulangi, dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Kementerian Agama menyelenggarakan 5 program:

Yang pertama, program dukungan manajemen;
Lalu. program kerukunan umat dan layanan kehidupan beragama;
Kemudian, program pendidikan tinggi;
Program kualitas pengajaran dan pembelajaran;
Dan program pendidikan anak usia dini dan wajib belajar 12 tahun.

Adapun Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kementerian Agama berdasarkan program yang dikelola oleh Kementerian Agama tertuang di dalam tabel nomor 3.

Perlu kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian anggota yang terhormat, bahwa dalam rangka mengkoordinasikan dan memastikan sinergi pencapaian sasaran program bidang pendidikan yang tersebar pada beberapa program dan eselon I, Kementerian Agama berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan di tingkat Kementerian Agama melalui penyediaan struktur anggaran fungsi pendidikan pada program dukungan manajemen di lingkungan Unit Sekretariat Jenderal.

Keempat, Pagu Anggaran Tahun 2022 berdasarkan unit. 5 program sebagaimana tersebut di atas diselenggarakan oleh 11 unit eselon 1 Kementerian Agama yang tersebar pada satuan kerja pusat yang terdiri atas 11 Satker Unit Eselon I termasuk di dalamnya Sekretariat Baznas, Unit Pencetakan Alquran, dan Atase Haji pada KBRI Jeddah dan pada satuan kerja instansi vertikal dan UPT yang terdiri dari 34 kanwil provinsi, 514 kantor Kemenag kabupaten/kota, 2301 madrasah negeri, 3 SMA Katolik, 72 perguruan tinggi keagamaan negeri, 10 asrama haji, 14 balai diklat keagamaan, 3 balai litbang agama dan 1 Lajnah Pentaskhikan Alquran.

Adapun Pagu Anggaran Kementerian Agama tahun 2022 berdasarkan unit eselon 1 sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Yang pertama, program Sekretariat Jenderal Pagu Anggaran 2022 nilainya sebesar Rp2.225.932.788.000 atau setara dengan 3,35%.

Kemudian yang kedua, Inspektorat Jendral dengan nilai Pagu Anggaran 2022 Rp159.767.627.000 setara dengan 0,24%.

Kemudian yang ketiga, Dirjen Dinas Islam dengan Pagu Anggaran sebesar Rp5.674.984.685.000 setara dengan 8,54%.

Yang keempat, Dirjen Pendidikan Islam. Pagu Anggaran sebesar Rp52.492.052.930.000 dengan persentase 78,99%.

Yang kelima, Dirjen Bimas Kristen. Senilai Rp1.842.919.185.000 atau 2,77%.

Kemudian yang keenam, Dirjen Bimas Katolik sebesar Rp886.800.288.000 atau 1,33%.

Yang ketujuh, Dirjen Bimas Hindu dengan Pagu Anggaran sebesar Rp781.500.789.000 atau setara dengan 1,18%.

Berikutnya kedelapan, Dirjen Bimas Budha nilai Pagu Anggarannya Rp261.775.634.000 atau 0,39%.

Sembilan, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rp1.385.559.590.000 atau 2,09%.

Kemudian. Badan Litbang dan Diklat sebesar Rp627.724.807.000 atau setara dengan 0,94%.

Yang terakhir yang kesebelas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan pagu anggaran Rp114.190.163.000 atau 0,17%.

Adapun uraian Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 berdasarkan unit atau program atau kegiatan sebagaimana bisa dilihat pada lampiran yang pertama.

Terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak Ketua, pada unit Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama telah melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1443 H, 2022 M, antara lain terhadap anggaran penyelenggaraan ibadah haji akan dilakukan penyesuaian dengan kondisi pada saat penyelenggaraan ibadah haji.

Penyesuaian anggaran tersebut akan dilakukan baik dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2022, maupun dengan anggaran tambahan yang akan dikoordinasikan penyediaannya dengan Kementerian Keuangan sebagaimana kesimpulan saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VIII DPR RI yang terhormat dengan Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada Selasa 8 Juni 2021 di Bogor.

Kelima, Pagu Anggaran Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja. Untuk membiayai berbagai belanja dibutuhkan bagi penyelenggaraan program dan kegiatan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama anggaran akan dipergunakan untuk membiayai 3 jenis pengeluaran.

Yaitu yang pertama, belanja pegawai operasional. Belanja pegawai operasional digunakan antara lain untuk gaji pokok dan tunjangan anak istri atau suami, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan fungsional, tunjangan struktural, tunjangan profesi guru, tunjangan dosen, tunjangan, kehormatan profesor, tunjangan tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus dan lainnya.

Yang kedua, belanja barang operasional. Belanja barang operasional digunakan untuk membiayai operasional kantor dan sarana pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan operasional, perjalanan dinas, langganan daya dan jasa, serta berbagai kegiatan operasional lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perkantoran.

Dan yang ketiga belanja non operasional. Belanja non operasional ini digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan kegiatan di luar belanja pegawai dan belanja barang operasional termasuk dalam hal ini adalah pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan rencana kerja pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan berbagai program dan kegiatan prioritas nasional kementerian.

Rincian Pagu Anggaran Kementerian Agama Tahun 2022 berdasarkan jenis pengeluaran tertuang di dalam tabel nomor 5.

Poin b, Rencana Kerja Tahun 2022. Yang pertama rencana kerja pemerintah pada Kementerian Agama. Sesuai dengan tugas dan fungsinya arah kebijakan Kementerian Agama menyesuaikan dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan presiden sebagai prioritas nasional sebagaimana terkandung dalam RPJMN 2020-2024.

Prioritas nasional tersebut meliputi antara lain:

Yang pertama, sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing

Yang kedua, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Yang ketiga, ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Untuk rencana kerja Kementerian Agama dalam menunjang Program Prioritas Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020-2022 sebagaimana tampak pada tabel 6. Adapun rincian output rencana kerja kementerian tahun 2022 berdasarkan prioritas nasional,

program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional sebagaimana termuat dan bisa disaksikan di lampiran kedua.

Selain itu berkenaan dengan rencana kerja tahun 2022 serta dalam mendukung pencapaian prioritas nasional pada tahun 2021 Menteri Agama menetapkan 7 program prioritas Kementerian Agama. Program prioritas Kementerian Agama tersebut adalah:

Yang pertama, penguatan moderasi beragama.

Kemudian yang kedua, transformasi digital.

Yang ketiga, revitalisasi KUA.

Yang keempat, *Cyber Islamic University*.

Yang kelima, kemandirian pesantren.

Yang keenam, religiosity indeks.

Yang ketujuh, kaum toleransi.

Beberapa kegiatan persiapan dan pendukung untuk melaksanakan program prioritas ini telah dilaksanakan tahun 2021 melalui anggaran yang terdapat pada DIPA Tahun Anggaran 2021, baik yang sudah teralokasikan sebelumnya pada unit-unit eselon 1 maupun yang diperoleh melalui realokasi belanja tahun 2021.

Kedua terkait dengan mitigasi pandemi COVID-19. Untuk itu di tahun 2022 ini penanganan COVID-19 di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan dengan pendekatan dalam dua hal, yaitu :

Pertama, penyediaan anggaran yang dilakukan melalui *earmarking* atau menandai anggaran-anggaran yang bersifat tidak mendesak di kisaran 5-5,5% untuk *refocusing*, jika kondisi COVID-19 belum terkendali dan mengalami kenaikan. *Earmarking* ini sesuai dengan amanat Presiden pada sidang kabinet pada tanggal 9 Agustus 2021 yang lalu. Besaran ini diambil dari akun-akun belanja seperti belanja barang operasional, belanja barang lainnya, belanja paket *meeting*, belanja perjalanan dinas, belanja jasa profesi, belanja honor kegiatan, belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pemda.

Yang kedua, penyediaan anggaran pada satuan kerja di tingkat pusat, instansi vertikal, dan UPT yang dilakukan dengan pemberian arahan kepada pimpinan satuan kerja untuk menyesuaikan penganggaran dalam rangka upaya preventif dan mitigasi COVID-19. Upaya tersebut antara lain berupa penyediaan handsanitizer, masker, face shield, vitamin dan suplemen, *termogun*, penyemprotan disinfektan di ruang kerja dan penyediaan (suara tidak jelas) PCR Antigen serta penyediaan kuota internet untuk pelaksanaan Work From Home dan Pembelajaran Jarak Jauh serta pengembangan *e-learning* atau *learning management system*.

Pimpinan dan para Anggota Komisi VIII yang terhormat.

Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan dalam rapat kerja pada pagi hari ini mengenai pembahasan RKA K/L Tahun Anggaran 2022. Kami tentu mengharapkan perhatian dan dukungan penuh dari Pimpinan serta para Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat atas rencana kerja dan anggaran yang telah kami sampaikan, dalam rangka peningkatan kualitas layanan kehidupan dan kerukunan umat beragama, kualitas pendidikan agama dan keagamaan, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Agama.

Sebagai penutup, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridoi ikhtiar kita semua dalam rangka membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekian, terima kasih.

(suara tidak jelas)

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Menteri. Atas penjelasannya terhadap agenda hari ini. Sebelum saya sampaikan atau beri kesempatan kepada para anggota dan pimpinan, saya hanya mengkonfirmasi Pak Menteri saja ini ada rapat kerja tanggal 2 Juni 2021 tentang Pagu Indikatif dan ada Rapat Dengar Pendapat dengan eselon 1. Di situ waktu itu kita Komisi VIII menyetujui tambahan anggaran, Pak Menteri.

Saya, apa tadi sudah termaktub di penjelasan Pak Menteri atau belum Pak Sekjen? Ya. Sedangkan di rapat tanggal 8 Juni 2021 dengan para Eselon 1, salah satu kesimpulan di poin kedua yang pertama itu Dirjen Pendidikan Islam mengajukan tambahan 4,9 triliun. Kemudian Bimas Islam 3,9 triliun, Pak Komariyah (suara tidak jelas) terima kasih untuk Alquran itu ya. Kemudian Balitbang 314 miliar. Ini mungkin termasuk untuk penyaluran dan sebagainya. Kalau sudah masuk ya alhamdulillah Pak Menteri. Tapi kalau belum masuk, saya hanya mengingatkan saja biar nanti di kesimpulan nyambung untuk kita sambung ke bagan besar. Ya. Artinya ini kita sudah setuju waktu itu, kita setuju, terhadap semua tambahan anggaran tadi Dirjen Pendis dan Bimas Islam termasuk Balitbang. Kalau belum masuk nanti mohon itu dimasukkan Pak. Supaya nanti di kesimpulan kita pertegas kembali. Supaya nanti Banggar Komisi VIII bisa mengawal di (suara tidak jelas) Pak Menteri. Supaya nanti menjadi penting, ada kesinambungan hasil rapat yang lalu dengan rapat hari ini gitu.

Baik. Kita persilakan kepada para anggota sebagaimana biasa, kita per Fraksi karena ini pandemi, kita per Fraksi, silakan untuk menunjuk juru bicara atau kapoksi langsung akan berbicara kami serahkan kepada masing-masing fraksi nanti. Fraksi PDIP, Pak Paryono? Silakan Pak Paryono.

F- PDIP (PARIYONO) : (00:33:42)

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII Pak Hendri, Pak Sekjen, beserta jajarannya.

Melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri nanti kita kan ada pendalaman khusus dengan Eselon I. Jadi kita bedakan menanyakan secara detail hanya beberapa hal yang sifatnya nanti menjadi kebijakan ataupun keputusan Kementerian Agama, Pak Menteri ada di sini kami ingin menanyakan.

Sudah menjadi isu dan realita yang dari dulu sampai hari ini di lapangan tentang kekurangan guru agama Islam di sekolah-sekolah negeri khususnya. Ya. Hal ini akan menjadi dominan siapa? Ini jadi pemerintah daerah sendiri juga akan kebingungan tanpa ada kepastian dan keputusan tentang kepastian guru agama yang dari dulu sampai hari ini belum ada kepastian. Padahal yang namanya agama ini menjadi fondasi awal generasi muda, generasi bangsa yang harus ditanamkan sejak dini.

Nah, ini tolong Pak Menteri untuk menjadi perhatian serius yang dari dulu saya di DPRD, saya di pemerintah sampai hari ini isu ini tidak pernah selesai dan tidak pernah ada yang pasti. Ada jawaban-jawaban yang mendekati pasti ketika ada di meja-meja rapat saja. Nah ini tolong Pak Menteri menjadi perhatian hal ini sangat ditunggu-tunggu ya oleh sekolah-sekolah dan anak-anak kita yang memang sangat kurang guru agama Islam ini.

Dan juga yang tidak kalah penting perhatian dari Kementerian Agama ini tentang kantor-kantor urusan agama. Ini sangat memprihatinkan baik dari segi fisiknya, dari operasionalnya, ini perlu perhatian serius sama menteri. Ya memang kalau kita melihat angkanya 66 triliun ini sangat besar sekali. Tapi satu jabatan ke mana ya mungkin sampai bawah ini merasa kurang. Jadi ini tolong KUA ini pusatnya ya urusan-urusan yang sangat vital dari orang nikah, orang pembinaan agama, pembinaan sosial dan lain sebagainya.

Itu saja Pak Menteri yang lain nanti akan kita dalami dengan eselon 1. Ini akan menjadi agenda Pak Menteri hari ini sangat strategis sekali sehingga ini keputusan ini ditunggu menyangkut masa depan anak-anak kita. Terima kasih.

Akhirul kalam.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, Pak Pariyono.

Betul Bapak Ibu anggota, hari ini Pak Menteri menyampaikan papan RKL untuk pendalaman nanti hari Senin ya. Hari Senin jam 10 dengan eselon 1. Jadi untuk menukik Senin. Ya menukik Pak Menteri kalau masalah anggaran. Nanti kita tukik dengan para eselon 1 ya.

Baik, kami persilakan Golkar.

F- P. GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Bapak Menteri Agama beserta seluruh jajaran yang hadir pada hari ini yang saya hormati.

Tadi secara seksama saya menyimak paparan Pak Menteri. Saya ikut prihatin rupanya di Pagu Anggaran tahun 2022 ada penurunan sebanyak 44 miliar. Sedikit Pak Menteri, dibandingkan dengan mitra kerja kami yang lain. Yang anggarannya sedikit tapi juga diturunin juga gitu. Mudah-mudahan dengan penurunan ini tidak merubah atau tidak merusak suasana kerja di lingkungan Kementerian Agama. Hanya 44 miliar.

Pak Menteri yang saya hormati, sebenarnya okelah tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Paryono bahwa menukiknya kita adalah ketika rapat dengan para eselon 1, Pak Sekjen dan eselon 1 nanti gitu. Tetapi kami juga ingin tahu, di tahun 2021 bagaimana serapan daripada anggarannya. Terlebih juga terhadap anggaran daripada Dirjen Haji dan Umroh yang sama-sama kita ketahui pada tahun 2022 ini maupun di tahun 2021 tidak melaksanakan haji dan umroh. Nah bagaimana serapannya? Tetapi untuk lebih jelasnya nanti kami akan mengupas secara jelas dan tegas nanti pada rapat dengan eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama.

Yang kedua, adalah tadi disampaikan bahwa dari Pagu Anggaran 2022 tersebut pada prinsipnya terdiri dari dua fungsi yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan. Tadi juga disampaikan bahwa ada program-program yang telah disampaikan kepada kita bersama. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Pak Menteri sekarang banyak embarkasi-embarkasi yang mangkrak.

Contohnya di tempat saya. Apakah ada alokasi dana untuk ya embarkasi-embarkasi yang mangkrak tersebut? Sebab sebagaimana kita ketahui kalau bangunan-bangunan tersebut tidak difungsikan bukannya bangunan tersebut bertambah baik, justru bertambah hancur. Saya beberapa hari yang lalu secara inisiatif aja saya sempat jalan-jalan *wuaduh*, hutan. Jadi tidak terawat. Dipinggir-pinggirnya itu sudah tumbuh dengan pohon-pohon gitu.

Jadi saya sengaja saya mengambil posisi dari poksi saya untuk bertanya karena saya akan memperdalam itu ya supaya bukan barangkali bukan hanya dialami oleh dapil saya sendiri, tetapi juga mungkin asrama-asrama haji atau embarkasi-embarkasi haji yang dalam pembangunan yang menggantung atau belum tuntas. Yang belum dapat dipergunakan secara fisik. Oleh karena itu, saya mohon penjelasannya nanti gitu ya dalam porsi terhadap embarkasi-embarkasi yang belum selesai tersebut di mana porsi anggarannya?

Yang lain-lain nanti akan kita bicara banyak dengan Pak Sekjen maupun dengan para Dirjen, ya. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan memang selain dari guru agama juga penyuluh-penyuluh agama Pak Menteri yang honorinya hanya sekitar 250.000-300.000-an ya apalagi akibat Covid ini. Nah, bagaimana artinya itu dapat kita selesaikan secara baik, sehingga jangan terlalu jauh ketimpangan penerimaan secara ekonomi terhadap yang bersangkutan. Terima kasih pimpinan.

Wabillahittauhiq walhidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT :

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak John Kenedy Aziz dari Golkar.

Kami persilakan dari fraksi Gerindra, Pak H. Husni.

F- P. GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati pimpinan Komisi VIII dan jajarannya.

Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII, baik yang hadir fisik maupun secara virtual.

Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan para Sekjen dan Eselon I.

Pak Menteri Agama yang saya muliakan, mohon maaf mohon izin ini Pak. Di halaman 3 bahwa Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2022

berdasarkan fungsi agama 15,95%, pendidikan 84,05 ini tahun 2021 seperti ini juga Pak. Tahun 2020 juga seperti ini, mohon maaf Pak Ketua ini seperti *copy paste* saja.

Kemudian Pak Menteri, kami juga ada mendengar, mendengar lewat media sosial maupun lewat media elektronik maupun, bahwa sekarang ada bantuan masjid dan mushala yang terdampak COVID-19. Jadi ini ada tentunya ada lebih kurang kami ketahui bantuannya ada 6,9 miliar. Saya yakin di kampung Pak Menteri banyak masjid, banyak mushala, dan juga pasti banyak terdampak Covid. Jadi mohon izin nanti Pak Menteri untuk dapat dijawab bahwa seperti apa bantuannya dan juga bagaimana kira-kira kita bisa mendapatkannya?

Kemudian juga masalah KUA, ini masih banyak yang meminjam tempat milik pemda dan lain sebagainya karena saya juga melihat Pak Menteri banyak yang tempat-tempat di Sumatera Utara, kalau saya tidak salah, itu awalnya tuh milik pemda akhirnya bisa beralih kepada menjadi milik daripada Kementerian Agama. Tentunya di sini ada *lobby-lobby* dari Kementerian Agama supaya lahan-lahan yang dimiliki pemda dan pinjam pakai dan sebagainya supaya tidak terjadi akhirnya pengosongan pengusiran dan pemindahan daripada KUA-KUA yang bersangkutan.

Kemudian juga tentang masalah haji. Haji kemarin 2021 batal, 2022 juga batal, tentunya di sini ada alokasi-alokasi dana ke mana dipindahkan dan lain sebagainya. Dan ini menyangkut di Kota Medan ini Pak Menteri ya. Pertama karena masalah gedung mangkrak Pak Ketua. Kalau di UIN, UIN Medan itu sudah banyak jatuh korban, jadi saya pikir ada *good will* dari Kementerian Agama supaya ini terselesaikan, ya. Dulu saya di Komisi 3, Pak Menteri. Jadi gak enak juga kita ditanya polisi ini gimana Pak ini, gak selesai-selesai ini kayaknya.

Kemudian juga, satu lagi, gedung mangkrak yang di asrama haji Medan itu katanya tinggal sedikit lagi permasalahan dan setahu saya gedung mangkrak asrama haji ini belum naik ke permukaan, ya. Maksudnya naik ke permukaan belum jadi suatu proses hukum di sana. Saya pikir ya hal-hal seperti ini harus tepat ditangani dan diatasi karena malu juga kita. Ini Kementerian Agama kok banyak kali masalah hukum. Apalagi di tempat saya di Medan itu ya. Jadi mohon kiranya Pak Menteri hal-hal seperti ini apalagi masalahnya kalau di asrama haji mungkin masalahnya tinggal sedikit lagi ya. Tapi namun begitu ya seperti apa harus ada jalan keluar dan penyelesaiannya supaya hal-hal yang belum timbul ke permukaan tak perlu kita timbul-timbulkan.

Yang lain-lain saya pikir, saya setuju. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan berkenan di hati Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Begitu saja Pak Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Biasanya Pak Jefri, Pak Husni cuma ngomongin dapilnya aja terus hari ini gak ngomongin Fraksi Gerindra katanya. Baik, terima kasih Pak Husni dari Gerindra.

Kita lanjutkan ke Fraksi Nasdem. Ibu Wulan, silakan Bu Wulan.

F- P. NASDEM (Hj. SRI WULAN, M.M)

Terima kasih pimpinan.

Yang saya hormati dan juga rekan-rekan Pak Menteri dan juga jajarannya.

Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sehat selalu.

Kalau misalnya kita mencermati, khususnya saya yang tadi dibacakan dari Pak Menteri, saya tidak melihat gambaran apa-apa yang dijelaskan sama Pak Menteri. Jadi pertama tolong dijelaskan kegiatan prioritas nasional paling nggak kita diberi gambarannya. Tetapi tadi disampaikan sama Pak Menteri hanya prioritas nasional saya saja gitu. Jadi antara programnya dan kegiatannya jadi diberikan bayangannya aja tidak, gitu kan. Itu yang pertama.

Kedua, Pak Menteri mohon maaf perkenalkan saya Wulan dari Jateng 3 Dapilnya Pati, Blora, Grobogan, Rembang. Ya. Jadi pas kemarin ke Rembang ora usah ngacur dewe gitu lho Pak. Ya kan. Kita mbok dilibatkan. Begitu juga nanti teman-teman jugalah kalau misalnya ada turun ke lapangan, tolong gitu karena kita mitra paling nggak, kan nggak enak banget kalau misalnya kita ditanya loh tadi tuh ada Pak Menteri loh ke sini, kok nggak ikut serta? Kan sakitnya tuh di sini Pak kalau ditanya itu. Bener gak? Gitu. Jadi jangan sampailah kalau itu kita bermitra yang baik, membahas dengan semuanya, paling nggak turun ke lapangan juga sama.

Terus kemudian Pak Menteri, ini kan banyak sekali program-program yang turun ke lapangan kita justru tahunya itu dari masyarakat. Jadi contohnya kesehatan sanitasi, terus kemudian *halaqah* ponpes, ini maaf kalau misalnya saya salah baca ya. Ruang belajar ponpes, pembangunan asrama ponpes, BOP ponpes, rehabilitasi ponpes, kita tahunya itu justru dari masyarakat, gitu loh. Jadi kan kita heran, gimana sih koordinasi dengan dengan jajarannya? Kemudian komunikasi dengan kita, jadi jangan sampai itu sudah turun di lapangan kita nggak ngerti sama sekali. Kan nggak lucu. Kita mitranya, ditanya ngga tahu, ya kan. Karena tidak ada informasi dari sini. Jadi tolong ini kan juga udah menjadi kesepakatan kita berkali-kali di dalam rapat,

di dalam program maupun apapun yang turun di lapangan, kita paling nggak kan menjalankan fungsi kita sebagai *monitoring* di sana. Jadi jangan sampai kita *nggak* ngerti sama sekali gitu.

Terus kemudian yang berikutnya, waktu kemarin kalau nggak salah saya tanya tentang TIP di salah satu dirjenya panjenengan. Jadi TIP yang turun ini saya nggak ngerti, kenapa kita tidak diikuti langsung kan nggak lucu kalau misalnya kita ya sudah Bu nanti kita di dalam penyampaian aja kita ikut. Ya Allah Pak, piro sih sebenarnya? Kan nggak papa kita bedah sebenarnya di sini ada berapa partisipasi dari teman-teman yang ada di komisinya seperti apa, apa sih yang kita dapatkan dari masyarakat? Hanya nebeng nama tok Pak. Oh kita memperjuangkan apa usulan dari masyarakat ini lho yang belum apa termasuk di dalamnya. Kita perjuangkan di situ dan kemudian kita bisa membawa hanya itu aja, nggak lebih gitu lho.

Jadi tolong ini juga menjadi perhatian Pak Menteri beserta jajarannya, sebelum kita berbicara lebih lanjut karena tadi disampaikan sama Pak Ketua bahwa pembahasan lebih lanjut nanti beserta eselon 1-nya besok hari Senin nggak papa. Tetapi hari ini nanti tolong juga Pak Menteri itu jadi jangan sampai Pak Menteri ki gemes kita gitu lho *maksute*. Nah yang kayak gitu. Tolong nih Pak Menteri ya nanti dijawab dengan jelas jadi kita ngerti banget gitu lho permasalahannya di sana, program apa yang turun, kita juga bisa jawab kan keto e yo cantik gitu lho Pak. Ya. Terima kasih. Sudah lho Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik Bu Wulan. Kalo jawaban Pak Menteri sudah di hati Pak Menteri itu kelihatannya. Baik. Kita lanjut fraksi PKB. Kami persilakan Pak Nurhuda.

F- PKB (MF. NURHUDA Y):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Para pimpinan yang saya hormati.

Rekan-rekan anggota, dan rekanita Anggota Komisi VIII yang saya hormati.

Pak Menteri, Gus Yaqut, para eselon 1 yang saya hormati.

Dan semua jajaran yang saya hormati.

Dari Fraksi PKB, saya sebenarnya ingin mempertegas yang terakhir diusulkan oleh Fraksi PKB pada rapat di Ciloto kemarin. Yang pertama soal moderasi beragama, Pak Menteri. Jadi dari PKB mengusulkan ada semacam beasiswa untuk santri yang hafal alfiyah, 1002 bait kalo gak salah. Atau kalo gak hafal alfiyah ya bisa membaca kitab kuning dengan lancar itu. Itu usulan dari. Tujuannya apa? Tujuannya jadi kalau beasiswa itu diberikan kepada santri setiap tahun 100 santri yang bisa baca alfiyah 1002 bait itu, kemudian

diberikan kesempatan masuk di UIN, itu nanti akan memperbanyak populasi mahasiswa yang berbasis literasi beragama dan akan meningkat.

Nah implikasinya banyak ini, implikasinya diskusi-diskusi keagamaan yang di kampus akan jadi sangat bermutu. Dibanding dengan yang selama ini berjalan. Dan juga khasanah keilmuan akan jadi kaya di ruang-ruang belajar di kampus. Dan ini juga akan memacu dosen-dosen untuk belajar apa namanya agar tidak ketinggalan dengan mahasiswanya. Sehingga ini akan meningkatkan kapasitas UIN yang selama ini terkesan monoton, Pak Menteri.

Nah kemudian beasiswa 100 santri yang bisa baca kitab ini, ini isinya gak mahal sih karena 100 per tahun. Kita bayangkan misalnya dalam waktu 4 tahun kita bisa mencetak kader-kader generasi muda yang apa ya di UIN itu yang hafal alfiyah mungkin 4 tahun udah bagus, udah dapat 400 anak. Kalau tiap tahun kita produksi, ini nanti akan jadi semacam duta moderasi beragama. Itu usul-usul dari Fraksi PKB sehingga nanti kalau misalnya selama ini ada wacana kok UIN itu kembali ke IAIN sebenarnya nggak relevan. Justru kita ingin meningkatkan yang kita perbaiki justru inputnya sehingga mereka nanti sehingga akan menjadi duta moderasi beragama di tengah ekstremisme yang selama ini meningkat. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua soal pusdiklat. Nanti mungkin pendalamannya di eselon 1 ya. Ini juga diusulkan oleh Fraksi PKB pada saat di Ciloto kemarin. Jadi mandat pusdiklat di pelatihan ini kan melatih, melatih baik itu pendidik, pengawas, penghulu, penyuluh, pembina, pembentukan kelompok jabatan, masyarakat yang itu jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau kami dapat laporan, itu SDM yang harus dilatih itu kurang lebih 1.873.000 sekian. Sementara daya tampung pusdiklat yang kami dapat laporan itu pertahunnya hanya 52.800.

Nah kalau misalnya satu orang sumber daya manusia dilatih dalam satu tahun kemudian dia akan ketemu pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya itu 5 tahun yang akan datang baru bisa ikut pelatihan berikutnya. Nah saya dengar di Kementerian Agama ini kan ada program namanya Massive Open Online Courses atau MOOC kalau gak salah saya denger itu. Nah itu mohon nanti dianggarkan karena itu saya lihat tahun kemarin belum ada anggarannya dan kemarin Fraksi PKB sudah mendorong itu. Itu sebagai alat kami mendukung sekali kalau itu program itu dianggarkan, diberikan anggaran. Kalau itu nanti akan mempercepat SDM di Kementerian Agama dan masyarakat. Dan itu nanti akan mempercepat peningkatan SDM pertahun bisa apa, bukan terlalu lama pelatihannya. Tapi pertahun mereka akan (suara tidak jelas) karena mereka berbasis online.

Dua hal itu aja Pak Menteri. Nanti mohon di pendalaman kita akan lihat mudah-mudahan sudah ada anggarannya. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Nurhuda. Baik, kita lanjutkan ke Fraksi Demokrat, ada Pak Wastam. Silakan, Pak Wastam.

F- P. DEMOKRAT (WASTAM, S.E., S.H.):

Terima kasih, Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Menteri Agama dan jajarannya.

Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi VIII dan para anggota Komisi VIII yang hadir secara fisik maupun virtual.

Terima kasih saya akan menyoroti hanya beberapa hal. Pertama Pak Menteri mohon untuk program yang segeranya dapat ditangani oleh Kemenag seperti program sanitasi pondok pesantren yang kemarin dikelola sama PPL mohon dikembalikan lagi ke Kemenag. Karena hal ini rata-rata itu yang lebih tahu adalah Kemenag. Jangan di kementerian lain. Buat di Kemenag aja dan mohon bisa diinikan buat anggota Komisi VIII juga diperankan.

Terus kedua, program SBSN mohon didengarkan. Karena dengan SBSN ini saya contohnya aja misal kayak UIN membangun universitas kedokteran dengan biaya anggap aja 300 miliar lah ya. Dengan SBSN ini sangat cepat. Karena universitas-universitas lain membangun dengan dana swasta aja sangat cepat pengembaliannya. Karena setelah terbangun, universitas-universitas itu akan ada pembiayaan yang gedung, yang mana ini, cukup untuk mengembalikan SBSN ini. Jadi mohon dana-dana SBSN kalau bisa ditingkatkan lagi, baik untuk membangun prasarana di universitas ataupun membangun prasarana-prasarana untuk mendukung program haji. Itu sangat cepat pengembaliannya.

Terus yang ketiga ini masalah KUA. Mohon Pak Menteri ini bisa berkoordinasi dengan kementerian lain atau dengan pemda atau dengan pemerintah pusat untuk masalah tanahnya sehingga program dari KUA itu nanti bisa lebih cepat. Karena kalau Kemenag mau membangun ternyata tanahnya bukan miliknya Kemenag itu tidak akan bisa. Jadi mohon untuk bisa berkoordinasi dengan kementerian lain atau dengan pihak lain seperti pemerintah pemda ataupun pemerintah pusat masalah tanahnya.

Yang keempat ini masalah guru honorer, yang tadi disampaikan sama Pak Paryono dan Bapak John mohon segeranya untuk guru-guru honorer ini pendapatannya ditingkatkan. Karena sangat memprihatinkan saat ini. Apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini. Mereka sangat membutuhkan sekali pendapatan yang lebih karena kebutuhannya sangat tinggi sekali kondisi-

kondisi seperti ini. Seperti itu aja Pak Menteri dari kami, dari Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalah warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Wastam. Benar itu yang sanitasi itu ya yang di pondok ya. Yang ngatur PUPR ya, tapi posisinya banyak di pondok pesantren. Lanjut kami persilakan dari Fraksi PKS, Pak Iskan Qolba, silakan.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati Pak Menteri Agama dan seluruh jajarannya.

Pertama, saya mengapresiasi Kementerian Agama yang sudah mulai masuk program transformasi digital dan kita tentu sangat tertinggal dengan kalau di era (suara tidak jelas) sekarang ekonomi berbasis digital, industri digital, dakwah digital, semuanya. Tetapi saya lihat Pak Menteri di dalam program di dirjen kan kebanyakan anggaran itu adalah Pendis, ya? Di Dirjen Pendidikan Islam itu tidak terbayang program Kementerian Agama menuju digitalisasi. Digitalisasi itu kan intinya kan segala sesuatunya itu adalah made in computer semuanya, made in internet. Nah ini yang belum terlihat saya lihat, Pak Ketua.

Jadi maksud saya harus antara kebijakan umum dan realisasi ini harus *matching*. Jangan hanya keren-kerenan aja masuk digital tapi di dalam program PAUD ngga ada, pendidikan tinggi ngga ada. Sekarang orang bisa Talal Abu Ghazaleh itu membuat universitas dari, dari apa namanya, dekat Aljazair sana dia bisa kuliah di seluruh dunia sekarang. S1, S2, semua, semua ilmu pengetahuan bisa dengan digital. Karena ke depannya itu gedung-gedung kita IAIN itu jadi laboratorium nanti, jadi museum-museum ke depan. Nah itu Pak Menteri itu diaktualisasi dalam program-program di Dirjen Pendidikan Islam ini ya. Bagaimana sistem digital ini? Intinya kan made in internet semuanya nanti. Sekarang pabrik-pabrik sudah semua sekarang digital. Tapi saya mau apresiasi itu Kementerian Agama sudah menuju ke sana ya.

Yang kedua, Pak Ketua, saya akan mengkritisi dari segi politik anggarannya. Dulu waktu saya membahas tentang Undang-Undang Keuangan Negara, Menteri Keuangan tidak pernah datang sekalipun. Kenapa

ini? Karena memang ketika DPR itu disumpah dia pun ada kata-kata "memperjuangkan daerah pemilihan". Ini sumpah yang belum bisa diaplikasikan dalam sistem anggaran kita. Dulu banyak teman-teman mengusulkan supaya anggota DPR itu slot, upamanya 30 miliar untuk mengusulkan dari dapilnya. Menteri Keuangan agak kesulitan karena melihat anggaran itu ada di, anggaran teknis itu ada di kementerian gitu. Jadi kalau tidak ini kita realisasikan di dalam komisi, DPR ini hanya tukang tempel aja Pak Menteri. Ya kan?

Nah kalau saya lihat ini Pak Ketua dari segi anggaran yang disampaikan oleh menteri, ada ini barang ini yang bisa diarahkan kepada keinginan anggota. Semua anggota dari dulu selalu dinyatakan ada ketidakadilan dalam sistem anggaran kita karena banyak madrasah-madrasah swasta itu yang mereka jumlahnya 90% tidak mendapatkan hak mereka. Ini sebetulnya ruhnya yang diperjuangkan dari teman-teman dari dulu saya lihat ya. Tampak dari itu semuanya partai sama itu, ngga ada itu partai yang lain-lain

Nah Pak Ketua di sini saya ada program memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi kerukunan dan harmoni sosial. Ini program bagus, tapi anggarannya besar banget 3 triliun sekian. Kalau ini umpamanya 500 M aja kita slot ke pesantren ini biar madrasah-madrasah itu dapat bangunan-bangunan baru itu saya rasa bagus itu. Itu salah satu bentuk apresiasi kita ke Menteri Agama untuk menerapkan apa namanya, anggaran yang berbasis keadilan.

Inikan belum adil juga. Tapi mulailah gitu ya. Jadi maksud saya Pak Ketua betul besok hari Senin kita mendalami anggaran tapi kita dari sini itu bisa lagi mengubah struktur politik anggarannya gitu. Paling yang sudah ada aja. Apa yang diserahkan dapil gitu. Jadi maksud saya di sini perlu juga kita mengalokasikan sebagian anggaran itu kalau saya perhatikan anggaran di masa Pak SBY di awal sekitar 350 triliun. Tapi sekarang sudah 1900 triliun, 2000 triliun, tetapi itu posturnya itu banyak akhirnya ke birokrat akhirnya.

Jadi Pak Ketua kalau kita lihat itu memang birokrat ini punya pegawai yang luar biasa banyaknya ya. Jadi uang itu banyak itu program ujung-ujung Eselon satunya sering ke daerah, sering ke daerah gitu. Kan ujung-ujungnya kesitu apakah dia nanti moderasi dulu kan ceramah juga ya kan. Kayak apa pengarahan, seperti itu. Tapi yang ke masyarakat itu pesantren itu apa gitu? Ini yang saya maksud. Jadi kita ini kalau mengkritisi ide dalam jumlah besar, agak sulit karena sudah dengan nomenklatur yang sangat banyak uang itu habis aja, habis aja dipake oleh birokrat gitu.

Nah itu maksud saya Pak Ketua sebelum kita hari Senin, itu harus ada slot anggaran untuk madrasah-madrasah itu apa 500 juga boleh, 1 triliun boleh, kalau memang itu nanti di pendalaman ini memang sudah ada keinginan teman-teman itu yang disebut dengan politik anggaran yang berkeadilan tadi ya, ya itu yang madrasah-madrasah ini. Saya rasa ini penting

ya. Jadi jangan sampai makin besar anggaran kita, itu disedot oleh birokrat semua gitu. Ini saya lihat banyak diserap birokrat gitu. Jadi okelah memang suasananya memang dibutuhkan karena kita berkembang, tapi menurut saya itu yang berkeadilan itu juga sebagai apresiasi teman-teman yang mengatakan gagah dia akan memperjuangkan dalam pemilu, apa yang diperjuangkan?

Yang anehnya lagi Pak Ketua, kalau kita Kementerian Sosial pergi ke daerah itu ketemu dengan mitra kita, ada PKH. Kalau Kementerian Agama kita nggak pernah pergi ke universitas-universitas padahal anggarannya 40 triliun, nggak pernah ke madrasah karena tidak ada slot yang dibuat itu adanya anggota DPR turun ke bawah, nggak ada. Ente siapa gitu kan? Tapi kalau dibuat umpamanya seperti moderasi. Kan DPR itu juga representasi dari rakyat gitu kan. Birokrat representasi dari birokrat, tapi rakyat ini apa ini.

Jadi maksud saya kita ini sering ke daerah tapi jarang ketemu dengan birokrat Kementerian Agama itu realitanya. Kecuali Dirjen Haji sekarang (suara tidak jelas) sosialisasi haji ketemu dengan haji. Tapi kan nggak pernah ketemu dengan IAIN Medan. Alasan apa kita ketemu? Tidak ada programnya kok. Kalau kita Kementerian Sosial ketemu dengan PKH, ketemu dengan ini, ketemu dengan ini semuanya kita ketemu. Ketemu dengan lansia, lansia pun ketemu. Karena Kementerian Agama itu kita nggak ketemu. Kenapa? Tidak ada slot yang dibuat, yang menjembatani anggota dewan dengan Kementerian Agama. Jadi kalau 1 T kita oper anggaran itu ke apa, kita ada kesempatan ketemu dengan masyarakat. Apa kabar Pak Kyai? ini ada bantuan gedung nggak seberapa ya, Cuma (suara tidak jelas) alhamdulillah saya ini masih diakui oleh negara padahal saya udah berjuang, begitu Pak Ketua. Itu saja barangkali.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Iskan Qolba dari PKS. Kami persilakan dari Fraksi PAN, Pak Muhammad Rizal.

F- PAN (H. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.Si):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.

Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya.

Saya ada beberapa hal yang perlu saya pertanyakan. Yang pertama saya ingin tahu sebenarnya program yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini khususnya terhadap pendidikan yang ada itu ke mana saja? Apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi fokus atau juga sifatnya merata? Atau juga ada yang mungkin tadi yang sudah dibicarakan oleh Bapak Komisi VIII misalnya mengakomodasi dapil-dapil anggota di Komisi VIII. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua terkait dengan penambahan guru, saya melihat di dalam satker Dirjen Bimas Islam itu belum ada kekhususan. Mungkin perlu ada satker baru, saya tidak tahu apa masuk di satker mana yang khusus penambahan guru-guru agama. Karena ini memang menjadi keluhan di beberapa daerah dan terutama di wilayah Banten, ini mereka mengharapkan guru-guru agama yang di pondok pesantren ataupun guru-guru agama yang ada di madrasah itu ada semacam pengangkatan Pak. Karena mereka honorer itu terus dari dulu sampai sekarang itu mereka. Gitu. Jadi mungkin ada khusus penambahan berapa kira-kira guru yang diperlukan di seluruh Indonesia.

Kemudian berikutnya, tadi sudah dibicarakan oleh bapak-bapak terkait dengan misalnya pembangunan atau bantuan tempat-tempat ibadah atau pondok pesantren atau madrasah, itu baru-baru ini, mungkin mudah-mudahan di 2002 tidak terjadi, ada surat edaran misalnya ada bantuan terhadap pondok pesantren yang berada di wilayah perbatasan. Kemudian yang kedua ada bantuan life skill, ada bantuan BOP, nah ini sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Saya lupa nomornya. Sehingga teman-teman yang ada itu menanyakan kepada kita karena kita termasuk mitranya Kementerian Agama. Nah ini agak membuat kegelisahan di pondok pesantren. Karena ada forum silaturahmi pondok pesantren Pak. Ini saya laporkan saja. Misalnya mereka mendatangi pondok menawarkan bantuan-bantuan itu. Dan bantuan itu menurut pondok sudah dihitung, Bapak akan dapat sekian katanya, dari pondok. Dan ini kami menemui pondok pesantren mereka mengeluhkan ini. Bagaimana cara mengatasinya? Mudah-mudahan di 2022 tidak terjadi lagi.

Nah kemudian baru-baru ini juga, ada semacam simas.go.id dari (01:14:13) dari Kementerian Agama Mengenai bantuan tempat-tempat ibadah, masjid atau mushala. Jadi mereka bisa *download* dari tuntunan simas.kementerian-agama.go.id itu. Ini bagaimana ceritanya kira-kira? Apakah memang ini hoax atau memang ada? Kalau ada mungkin bagus juga kita yang mendampingi misalnya. Diberikan slot misalnya untuk pembangunan musala dan masjid juga diberikan juga kepada mitra Komisi VIII ini sehingga kita juga jelas. Karena banyak sekali permintaan di dalam masyarakat adanya permintaan pembangunan mushala dan masjid.

Saya kita itu dan yang lain sudah dipertanyakan oleh bapak-bapak yang lain. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Muhammad Rizal dari Fraksi PAN.

Yang terakhir kami persilakan dari PPP. Pak Kyai H. Muslich. Baik, tidak ada. Dari meja pimpinan kami persilakan, Pak Ace.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY,

M.Si):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, para anggota, Gus Menteri dan seluruh jajaran Eselon I.

Saya setuju dengan teman-teman bahwa nanti secara teknis, secara rinci kita akan membahasnya di dalam pertemuan dengan eselon 1. Namun ada beberapa hal yang saya kira presentasi Gus Menteri ini kan nanti akan menjadi dasar untuk diturunkan ke dalam berbagai program yang lebih aplikatif gitu ya, rinci, dan menggambarkan tentang politik anggarannya. Intinya apa yang disampaikan oleh Gus Menteri kan sebetulnya ada pada halaman 7, yaitu 7 program permiss Kementerian Agama.

Pertama, penguatan moderasi beragama.

Yang kedua transformasi digital.

Yang ketiga revitalisasi KUA.

Yang keempat *Cyber Islamic University*.

Kemudian yang kelima kemandirian pesantren.

Yang keenam *religiousity index*, dan

Yang ketujuh adalah tahun toleransi.

Pertanyaan saya sederhana Pak Menteri, satu hal yang menjadi *concern* kami sesungguhnya adalah soal penguatan madrasah misalnya. Apa memang tidak menjadi satu prioritas kita? Karena kita tahu bahwa madrasah juga harus menjadi kekuatan kita gitu ya yang harus terus menurus kita dorong. Pertama itu. Jadi kami atau saya secara pribadi selalu menyampaikan bahwa sekali lagi ini soal kesetaraan anggaran juga sangat penting. Bagaimana pun para siswa-siswi yang belajar di madrasah mereka juga anak bangsa yang patut mendapat perhatian serius dari negara dan saya berharap ini jadi perhatian kita semua, termasuk di dalam proses penganggaran kita.

Yang kedua, catatan saya adalah karena ini nanti akan menjadi turunan dari program-program yang akan kita bahas secara lebih detail. Yang kedua saya mempertanyakan nomenklatur *Cyber Islamic University*. Ini juga penting untuk dielaborasi apa yang dimaksud dengan istilah *Cyber Islamic University*? Apakah konteksnya adalah transformasi proses digital

pembelajaran atau apa gitu? Apakah kita mau menjadikan UIN, IAIN, STAIN, semua akan berbasiskan pada proses pendidikan yang berbasis pada digital, atau apa? Ini saya kira harus *clear* gitu ya. Karena seperti beberapa kali selama saya di Komisi VIII saya selalu memiliki ambisi bahwa universitas-universitas Islam itu harus ada yang masuk dalam, setidaknya 10 besar universitas terkemuka di Indonesia gitu. Karena sejauh ini kan kita masuk 10 besar aja nggak ada. Termasuk universitasnya Pak Dirjen, teknis itu ya. Nah jadi ini istilah ini saya kira harus *clear* ya supaya jangan sampai membuat kita menjadi, turunannya menjadi jelas.

Nah kalau saya ini Gus Menteri ya, kalau saya kelompokkan rumpun dari 7 hal tersebut ya, sebetulnya penguatan moderasi beragama, *religiousity index*, dan tahun toleransi itu harusnya menjadi satu rumpun aja, ya. Menjadi satu rumpun. Jadi penguatan moderasi beragama apa sih sebetulnya tujuan dari penguatan moderasi agama? Ya agar indeks religiusitas kita itu betul-betul terjaga gitu. Sehingga toleransi dalam kehidupan keagamaan kita bisa terwujud, ya.

Atau yang kedua transformasi digital dan *Cyber Islamic University* yaitu sebetulnya satu rumpun gitu. Kalau mau dikelompokkan gitu ya. Nah termasuk juga soal kemandirian pesantren, ini juga jangan sampai harus *clear* gitu Pak Dirjen Pendis nih. Apa yang dimaksud dengan kemandirian pesantren? Apakah pesantren oke tidak ada intervensi negara karena kita sudah memiliki Undang-Undang Pesantren. Tapi jangan sampai kemudian makna dari kemandirian pesantren tersebut tidak hadirnya negara untuk membantu pesantren. Karena dinilai sudah mandiri gitu, sehingga gak perlu lagi ada bantuan-bantuan khusus terhadap pesantren. Jadi harus *clear* juga soal makna dari kemandirian pesantren ini, ya.

Saya kira itu catatan saya Gus Menteri. Supaya kita punya bayangan karena bagaimanapun *picture* besarnya adalah rapat hari ini. Nah rapat hari ini akan menentukan tentang turunan dari apa yang menjadi visi, misi besarnya Gus Menteri untuk kita terjemahkan di tahun 2022 nanti gitu di dalam program yang lebih konkret. Nah oleh karena itu yang saya kritisi adalah 7 program prioritas Kementerian Agamanya supaya ini *clear* gitu, ya. Dari situ selalu kita mengacu kepada itu semua.

Nah yang terakhir, karena ini bicara soal anggaran tentu yang harus menjadi catatan penting Gus Menteri adalah soal *man power* anggaran kita untuk Kementerian Agama ada berapa sih? Nah ini saya kira yang harus nanti mohon Gus Menteri sampaikan kepada kita untuk biaya gaji, untuk biaya dukungan manajemen dan lain-lain, yang turun ke rakyatnya atau ke madrasahnyanya, atau ke universitasnya, berapa gitu ya? Nah ini penting untuk diketahui. Karena dari presentasi Gus Menteri saya tidak melihat secara lebih rinci terkait berapa dukungan apa misalnya untuk gaji dosen, gaji guru, gaji pegawai, kanwil, Kemenag dan lain-lain yang, sehingga dari situ bisa kita lihat nih berapa alokasi yang bisa dialokasikan untuk kepentingan dukungan mobilisasi *resources* pembangunan kita. Saya kira demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih Pak Ace Hasan Syadzily. Kami persilakan Pak Marwan Dasopang.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/F- PKB (H. MARWAN DASOPANG):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan, para anggota yang saya hormati, Gus Menteri beserta jajaran.

Dilihat paparan Gus Menteri dari 7 program prioritas sebetulnya sudah agak menukik, ada perubahan cara memandang target dari 2021 ke 2022 terkait dengan persoalan yang kita hadapi. Karena itu nanti akan kita bahas secara detail di eselon 1 apakah sudah benar sasaran itu. Itu nanti kita dalam. Karena itu, saya dan Fraksi PKB menyetujui usulan ini anggaran yang disampaikan oleh Gus Menteri.

Tetapi ada beberapa catatan, paling tidak dari sudut pandang politik anggaran. Kalau berbicara tentang judul Kementerian Agama maka porsi 78,99 untuk pendidikan itu sebetulnya tidak adil. Karena itu, ini sudah lama Gus Menteri. Jauh dari sejak haul itu sudah seperti itu. Saya berharap ada kira-kira peta jalan ke kita melakukan ini fungsi agama ini seperti apa mau kita buat. Itu satu.

Yang kedua, saya mendukung pendapat beberapa teman-teman yang tadi termasuk Pak Ace, Pak Iskan itu waktu membahas Undang-Undang Pesantren itu kita mendapatkan aspek historisnya itu bahwa jauh sebelum Indonesia, pesantren sudah ada, madrasah sudah ada, dan dari situ ujungnya menjadi lahir Indonesia. Dan itu sampai sekarang seperti itu. Lah dari prioritas ini disebutkan kemandirian pesantren walaupun Pak Ace masih bertanya kemandirian yang dimaksud itu jangan-jangan sudah dianggap mandiri kira-kira. Tetapi pesantren dan madrasah yang menjadi hasanah umat Islam ini itu menjawab persoalan kebangsaan kita. Jadi banyak yang tidak terjangkau negara, banyak yang belum bisa dilayani negara, pesantren itu mencerdaskan anak bangsa. Dan manusianya jadi pakai bangsa ini hasilnya itu dipakai bangsa menyelesaikan urusan-urusan negara. Nah itu sampai sekarang belum terjawab.

Dan bahkan tadi waktu Pak Menteri sedikit menguraikan sasaran itu kita belum melihat pesantren madrasah sekalipun disebutkan di situ ada kemandirian pesantren. Ini perlu kita yakinkan pemerintah bahwa apa yang dilakukan oleh pesantren termasuk PTKIS di situ tadi cuma PTKIN yang kita sebutkan, PTKIS belum. Padahal itu PTKIS juga melahirkan sarjana, melahirkan manusia cerdas, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini cara politik

anggarannya bagaimana kita buat? Kita selalu berbicara itu tapi kita belum bergerak ke arah sana.

Kalau hal-hal lain saya pikir transformasi digital sudah memang itu tantangan kita karena termasuk mengenai situasi kemasyarakatan kita ya memanfaatkan digital kadang-kadang penyuluh kita kalah dengan kecepatan orang memakai gadgetnya itu. Itu saya pikir saya setuju dengan prioritas ini.

Tinggal cara kita apalagi kemandirian pesantren yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Gus Menteri itu menjawab turunan dari Undang-Undang Pesantren kalau saya tangkap. Saya yakin Pak Ace pun menangkap itu cuma kepingin diperjelas kira-kira. Saya kira itu catatan dari saya Ketua. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Marwan Dasopang. Kami persilakan yang terakhir Ibu Diah Pitaloka.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.)

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedikit aja di tengah banyaknya kebutuhan sebetulnya ya bukan persoalan tuh karena kebutuhannya memang tinggi. Tapi kalau dilihat ini diproporsi anggaran 78% itu sudah pendidikan Islam. Ini bicara konstruksi anggaran Kementerian Agama. Yang lain itu nol koma, satu koma, dua koma, kalau saya sih melihat kesalahan secara keseluruhan dalam kerangka ini, sebetulnya kita belum optimal. Artinya kebutuhan anggarannya tuh sebetulnya dari Kementerian Agama lebih tinggi daripada ini. Dan pendidikan Islam juga itu sebagian besar masuk ke dalam agenda anggaran yang sifatnya normatif, gaji dan operasional.

Nah saya jadi paham gitu ya ketika makin mendalam Kementerian Agama di berbagai ruang itu anggarannya mepet-mepet sekali gitu lho. Di luar belanja normatifnya. Nah saya ngga tahu bagaimana kita bicara politik anggaran ya, tapi anggara Kementerian Agama menurut saya kurang. Apabila kita punya target mengikuti fungsinya. Ini kan diluar 78,99 kan yang lainnya nol koma, dua koma, gitu lho. Ya kan? Termasuk fungsi Bimas ya kan, padahal ya inilah yang membuat serba tanggung gitu lho tiap tahun gitu ya.

Termasuk juga pesantren ya Pak Marwan ya, kita tahu kebutuhan riil dari Kementerian ini yang belum bisa difasilitasi secara utuh oleh proporsi anggaran yang ada dari APBN. Nah inilah yang menurut saya catatan yang menurut saya kita harus bekerja sama untuk membangun satu kerangka berpikir dalam politik anggaran kita ya, di APBN. Ini menjadi daya dorong gitu bagi kita meningkatkan anggaran Kementerian Agama karena kalau dicermati fungsinya yang ada ini semua masih mepet-mepet gitu termasuk juga Dirjen Pendis gitu. Ya itu aja Pak Menteri. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik Bu Diah Pitaloka terima kasih. Sekarang jam 12 kurang 10 menit, ada waktu untuk Pak Menteri menjawab. Tapi sebelum menjawab ini ada usulan tambahan anggaran 11,5 triliun nanti tolong disampaikan Pak Menteri. Ada Pendis, Bimas Islam, Litbang, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Sekjen, Irjen, PHU, BPJPH. Catatannya 11,5, ini udah kita setuju waktu rapat beberapa waktu yang lalu. Silakan Pak Menteri.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Terima kasih Ketua. Saya akan pelan-pelan menjawab karena banyak sekali ini Pak Ketua mohon izin. Jadi nanti kalau kurang waktunya mohon diperpanjang Pak.

Saya akan mulai dari Pak Ketua. Terima kasih atas dorongan Pak Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR yang terhormat soal usulan tambahan anggaran yang sebesar catatan saya ini Rp11.514.205.705.000 kita akan segera usulkan ini dalam pembahasan tripartit Pak bersama Kemenkeu dan Kepala Bappenas. Sesegera mungkin kita usulkan dan mudah-mudahan ini segera dan bisa disetujui. Kalau bisa disetujui saya kira tadi pertanyaan soal politik anggaran sebagaimana disampaikan oleh Pak Ace, Bang Marwan dan Bu Diah Pitaloka saya kira juga akan lebih mudah dalam kita melakukan aktualisasi di penganggarnya. Inshaallah ini mudah-mudahan.

Tadi sebenarnya di pembicaraan secara informal kita sudah sampaikan tetapi belum ya masih perlu esok yang lebih saya kira. Dan Pagu Indikatif terakhir yang disampaikan dari Kemenkeu faktanya masih seperti yang saya tadi sampaikan. Tapi tentu insya allah ini kita akan membuat, kita berhenti sampai di sini karena ini lagi-lagi adalah kepentingan anak-anak bangsa saya kira dan harus kita semua perjuangkan.

Pak Paryono tadi soal kekurangan guru agama Islam. jadi saya perlu menyampaikan prosesnya ini supaya kita ini nggak salah paham apalagi memiliki paham yang salah gitu ya. Jadi guru agama itu usulannya dari pemda Pak, kepada Kemendikbudristek, kemudian yang memutuskan itu MenPANRB. Jadi Kementerian Agama ini nggak dapat bagian apa-apa kecuali agamanya saja. Jadi memang situasinya seperti itu dan saya akan mencobalah ini nanti bicara dengan KemenPANRB dan Kemendikbudristek karena kami juga memahami ini *problem* guru agama kami sudah dapat masukan juga dari bawah itu dan sebenarnya sudah berkali-kali kita coba mengajak bicara ini tapi ya masih terbentur dengan prioritas yang lain. Jadi masih belum dapat pintu masuknya. Mudah-mudahan setelah rapat ini kita bisa dorong.

Kemudian kantor-kantor KUA yang memprihatinkan, memang betul makanya disalah satu program yang akan kita lakukan itu program prioritas kita adalah revitalisasi KUA Pak, karena kita tahu faktanya baik secara fisik ya, *hardware* maupun *software*-nya. Secara bangunan itu banyak yang sudah berantakan tanah tidak dimiliki. *Software*-nya sama saja, manusia di dalamnya juga saya kira perlu ditambah kapasitasnya. Nah itu makanya kita masukan salah satu program prioritas itu adalah revitalisasi KUA. Jadi mohon bersabar Pak.

INTERUPSI ANGGOTA:

Interupsi Pak Menteri. Izin pimpinan. Terkait dengan tadi rekrutmen ya. Selama ini memang yang kita tahu dari teman-teman dari guru agama khususnya yang PPPK. Memang itu kan rekrutnya diusulkan oleh pemda dan kemudian pembinaannya oleh Kementerian Agama termasuk kemudian masa jabatan itu. Tetapi faktanya di teman-teman PPPK yang sudah mendapat SK itu malah di-*down grade*-kan. Mereka yang sudah mengabdikan selama 15 tahun begitu dapat SK *inpassing* itu kemudian sama dengan 0 tahun. Ini sampai sekarang belum selesai.

Waktu rapat kita pada tanggal 18 Desember 2020 sebelum Pak Menteri itu sudah disepakati dalam kesimpulan kita khususnya di kesimpulan nomor 5 huruf D, di situ meminta Menteri Agama untuk memperbaiki terhadap pemberlakuan SK *Inpassing* yang mereka itu dianggap untuk kemudian disamakan, karena sama-sama *Inpassing*. PPPK yang dari Kementerian Diknas itu mereka dihargai Pak, yang 15 tahun, kan mereka 0 tahun kan 0-4 tahun sama dengan 0, tapi setelah itu ada penghargaan. Jadi saya kira itu mengingatkan Pak Menteri berkenaan dengan masa. Terima kasih.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Baik. Terima kasih diingatkan Pak. Saya lanjutkan Pak John Kenedy tadi sampaikan terkait serapan anggaran saya kira 2 hari yang lalu kita sudah sampaikan juga terkait serapan anggaran. Namun saya akan sampaikan

kembali jadi program yang sudah diserap dari seluruh eselon 1 di Kementerian Agama saya akan bicarakan total saja pagu yang ada kemarin itu 67,995 triliun kemudian realisasi 41,772 triliun dan ada sisa pagu 26,22 triliun. Jadi kurang lebih serapan anggaran tahun 2021 sudah 61,43%. Secara detail 2 hari yang lalu di rapat di tempat yang sama sudah kami sampaikan Pak John Kenedy jadi ini serapannya, termasuk anggaran yang ada di Dirjen PHU yang tidak terpakai kemarin sudah dijelaskan dan sudah kita bicarakan juga bersama dengan Komisi VIII di rapat-rapat sebelumnya.

Nah soal fungsi embarkasi-embarkasi yang *mangkrak* ini juga bagian dari pengalihan anggaran BPHU itu salah satunya untuk mengatasi embarkasi-embarkasi yang *mangkrak* itu Pak. Jadi secara detail kami kemarin sudah laporkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada Pak John Kenedy.

Kemudian tadi ada pertanyaan juga soal bantuan masjid dan mushala. Kami sebenarnya sudah membuka, sebentar saya buka di catatan saya. Di Kementerian Agama ini menyediakan anggaran kurang lebih 6,9 miliar ya untuk operasional bantuan masjid dan mushala yang terdampak pandemi covid dan kami sudah mempermudah prosesnya agar tidak perlu membuat proposal yang sulit gitu, proposal yang harus apa *njelimet*-lah proposal itu, kami membuka, jadi bisa diunggah saja dokumennya melalui simas.kemenag.go.id di situ ada permohonan bantuan di sana Pak, bisa dimasukkan di situ dan nanti kalau sudah dimasukkan bisa misalnya Pak Husni ada konstituen yang mengajukan atensi langsung kontak manalah ke Pak Bimas tetapi formulirnya tetap online saja biar tidak merepotkan. Nama mushala atau masjidnya apa langsung kontak Pak Dirjen, jadi supaya mudah Pak ngga usah bikin proposal kembali gitu.

Nah itu kemudian soal KUA sudah kita jawab, soal gedung *mangkrak* di UIN dan Asrama Haji Medan sama dengan jawaban soal asrama haji sama dengan jawaban ke Pak John dan yang terkait dengan UIN kita akan selesaikan Pak. Kita tahu situasi di UIN Sumut, makanya kita menghindari singkatan UIN Sumut gitu ajalah enak. Jadi kalau Su itu jadi masalah terus nanti. Makanya kita menghindari istilahnya. Jadi UIN Sumatera Utara, jadi UIN Sumatera Utara ini memang kita akan segera selesaikan semua sedang dalam proses Pak mohon, ya sekali lagi mohon bersabar.

Nah ini yang menarik Bu Wulan yang se Dapil dengan saya, tapi saya nyalonnya tidak di situ Bu Wulan, nyalonnya sekarang dengan Pak Huda itu. Jadi soal program-program prioritas nasional sudah tergambar, bukan hanya terbayang Bu. Sudah digambar di halaman 10 dan halaman 11, ya. Di presentasi yang kami sampaikan di sini sudah jelas tergambar di apa yang tadi sudah kami sampaikan.

Kemudian soal kunjungan ke Pati, ke Rembang, *ngga* ajak-ajak mungkin begini Bu. Kapasitas *hardware* saya ini *nggak* cukup kira-kira. Jadi kalau harus menyimpan banyak memori ya namanya manusia terbatas. Kalau Bu Wulan tahu, *nggak* ada salahnya saya kira Bu Wulan yang telepon saya atau *nggak* harus saya yang ngasih tahu Bu Wulan. Memang *problem* waktu

kejadian itu saya *nggak* inget karena keterbatasan memori itu masalahnya. Karena kita dikasih memorinya terbatas sama Tuhan, kita minta lebih juga susah sekarang. Jadi diingatkan saja, karena kebetulan itu juga sidak bukan yang terencana. Bukan kunjungan yang terencana. Jadi karena saya sepanjang tahun ini saya belum ketemu orang tua saya, saya mampir ke orang tua terus sidak sekalian gitu. Masa ke Rembang ketemu orang tua saja seperti apa itu, ya udah sidak aja. Itu sebenarnya sidak aja itu. Jadi tidak terjadwal, kalau terjadwal saya pasti lapornya ke Mbak Wulan itu.

F- P. GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Izin pimpinan. Memang Pak Menteri mengenai kunjungan ke daerah ini mungkin kalau Pak Menteri berkenan mungkin melalui Pak Sekjen atau melalui Pak Dirjen artinya koordinasi sama kita. Sebab telinga-telinga kita *ugh*, Pak John anggota Komisi VIII? Iya. Kok *nggak* tahu itu mereka datang kesini? Nah ini apa sangat-sangat ini buat kita gitu lho ya. Mereka diri sendiri nanti Pak kalau. Terima kasih Pak Menteri.

ANGGOTA :

Sedikit pimpinan. Maksud saya kita memaklumi keterbatasan kalau semuanya nanti di simpan di hardware Pak Menteri sudah pasti kita tahu itu tidak akan mampu. Tapi artinya dari jajaran Pak Menteri saya rasa tahu anggota itu di Komisi VIII ini dari Dapil mana saja jadi ketika ada kunjungan ha mungkin staf itu yang bisa mengingat ya.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Memang, saya selama ini jarang sekali melakukan kunjungan secara resmi, yang banyak ya sidak. Makanya jajaran saya juga pasti *nggak* tahu saya ke mana. Itu yang memang agak repot. Saya lebih banyak mengurangi kunjungan-kunjungan ke daerah supaya tidak banyak anggaran terbuang sia-sia Pak. Itu komitmen saya pada jajaran bisa dicek. Jadi kalau tidak *urgent* sekali saya tidak akan datang ke daerah. Jadi kalau kita ke daerah pasti kita akan sampaikan. Jangan khawatir itu Pak. Kemudian Pak Huda soal beasiswa ya kita juga memiliki.

F- P. NASDEM (Hj. SRI WULAN, M.M)

Pimpinan sebentar!

Sedikit aja satu menit. Jadi gini biar komunikasinya juga harmonis gitu kan yang mungkin kita laksanakan dan juga kita lakukan dengan kementerian-kementerian lain gitu kan, bagaimana kalau misalnya kita samakan juga di Kementerian Agama ini kita menjalin komunikasi secara WA

atau apa dengan anggota jadi kita biar enak gitu kan untuk menyampaikan apa aspirasi kita kepada Pak Menteri yang langsung atau misalnya Pak.

PIMPINAN KOMISI VIII/ F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Bu Wulan kan. Pak Menteri itu rapat kemarin.

F- P. NASDEM (Hj. SRI WULAN, M.M)

Iya saya kan lagi mendampingi Menteri Sosial jadi saya kan ngga ktahu jadi bisa saja saya sampaikan di sini kan. Terima kasih.

PIMPINAN KOMISI VIII/ F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Ya kalau setiap anggota *nggak* ikut rapat diulang lagi, *nggak* selesai-selesai rapat kita gitu lho.

F- P. NASDEM (Hj. SRI WULAN, M.M)

Itu kan contoh.

PIMPINAN KOMISI VIII/ F-PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt):

Mungkin gini saran saya ya terutama Kapoksi, kalau bagi anggota yang *nggak* sempat rapat dengan agenda penting lain, tolong sampaikan hasil rapatnya termasuk sekretariat, ya. Biar tidak diulang-ulang gitu lho. Karena kalau misalnya kayak Pak John diulang lagi mana serapannya, udah sama Pak Menteri sebenarnya. Jadi tolong Pak Sekretariat kalau ada yang datang memang *nggak* boleh banyak yang datang di komisi atau Pokja juga terbatas, hasilnya disampaikan. Biar tidak diulang-ulang lagi. Silakan Pak Menteri.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Ya terima kasih Bu Wulan mohon dicatat nomor saya 081314885399.

F- P. NASDEM (Hj. SRI WULAN, M.M)

Bisa diulangi Pak.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Nanti setelah rapat.

F- P. NASDEM (Hj. SRI WULAN, M.M)

Oke. Jadi masalahnya hasil keputusan kemarin yang untuk itu kan belum terwujud di sini. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Gus Menteri ini hanya soal kerjaan ya.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Skema beasiswa di Kementerian Agama ini mempertimbangkan beberapa kriteria. Yang pertama soal status hukum, status ekonomi. Status hukum ini tentu yang tidak mampu ya yang mendapatkan prioritas. Kemudian prestasi akademiknya juga bagus, lalu yang ketiga pemahaman keagamaan.

Nah selama ini di Kementerian Agama ini keagamaan itu ya kategorinya seringkali berupa *tahfidz*, jadi dia khufat gitu ya dia hapal Quran gitu atau memiliki pemahaman keagamaan. Mungkin kita, menarik juga kalau ditambah alfiyah itu. Saya hafal alfiyah tapi cuman depan dan belakangnya doang, tengahnya ngga. Pak Bukhori juga ngga Pak, udah lupa itu, hehehe

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Saya masih di tengahnya juga Pak.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Itu nanti menarik Pak. Terima kasih usulannya dan Pak Wastu sahabat saya juga menyampaikan Pak Wastam tadi menyampaikan kepada saya juga pada kita semua lebih banyak pada saran *insyaallah* kita akan perhatikan dan laksanakan.

Dan menarik dari Pak Iskan tadi soal digitalisasi yang belum terbayang di Pendis. Justru karena belum terbayang Pak Iskan kita akan mendorong pendis ini agar mendigitalisasi semua layanan pendidikan yang ada di dalamnya. Nah digitalisasi ini, kami desain memang untuk sebenarnya pertama menjawab tantangan situasi dan zaman. Kita sekarang bergerak

dalam situasi pandemi COVID-19 di mana semua lebih banyak dilakukan secara virtual maupun fisik, dibanding fisik lebih banyak virtual dibandingkan fisik. Jadi semua kegiatan lebih banyak seperti rapat kita pagi hari ini gitu ya. Serba dibatasi yang fisik sehingga digitalisasi ini mutlak diperlukan.

Nah katakanlah pandeminya akan berakhir setahun atau kapan kita tidak tahu, atau sebulan ke depan, saya membayangkan kita tidak akan kembali ke masa atau ke zaman di mana sebelum ada pandemi Pak. Jadi yang sudah berlaku sekarang ya ini akan jalan terus bahkan mungkin berkembang. Oleh karena itu digitalisasi ini menjadi mutlak diperlukan. Saya membayangkan begini, jadi semua pekerjaan-pekerjaan, bukan semua ya, hampir semua pekerjaan-pekerjaan kantor itu bisa dilakukan secara digital. Mulai dari surat-menyurat, penandatanganan, sampai kemudian di pendis sudah melakukan grasi misalnya rapat sudah dibuat secara digital, sehingga tidak perlu lagi anak-anak ini datang ke sekolah menerima rapot gitu. Jadi cukup dikirim secara digital. Anak-anak dan orang tua sudah bisa melihat rapot mereka.

Digitalisasi ini juga akan membuat semua yang kita lakukan serba transparan. Kalo saya membayangkan semua pekerjaan-pekerjaan misalnya yang project sifatnya gitu ya, misalnya semua bisa kontrol. Bukan hanya kita, bukan hanya menteri, anggota DPR tapi masyarakat juga bisa langsung kontrol karena di situ akan terlihat di apa, *dashboard* yang kita siapkan itu kan terlihat. Misalnya satu pekerjaan di embarkasi A, itu pagu anggarannya berapa, pemenang lelangnya berapa, siapa yang mengerjakan, progresnya seperti apa, sehingga meminimalisir proyek-proyek mangkrak seperti tadi disampaikan oleh Pak John. Jadi ini kita genjot terus sehingga kita jadikan apa digitalisasi ini sebagai apa, program prioritas Kementerian Agama.

Kenapa sekarang belum tampak? Ya karena barangnya belum jadi Pak. Ini masih proses. Inshaallah mudah-mudahan tahun depan sudah mulai kelihatan semua program-program yang terdigitalisasi. Mengurangi pertemuan fisik, mengurangi perjalanan dinas, mengurangi macam-macam Pak sehingga lebih banyak anggaran yang bisa kita siapkan untuk mengafirmasi banyak hal. Yang terkait dengan urusan keagamaan dan pendidikan. Itu yang akan kita kejar.

Kemudian soal perkuliahan tadi. Kan bisa itu di Aljazair tadi dicontohkan Pak Iskan. Nah sekaligus menjawab ketua, wakil ketua, pak pimpinan kyai Ace soal Cyber Islamic Univerisity. Cyber Islamic Univerisity ini adalah universitas yang kita desain ya yang kita desain 100% virtual. Jadi tidak ada pertemuan fisik di sana kecuali wisuda mungkin. Mungkin ya. Seperti di Hankuk University, ini bedanya dengan universitas terbuka Pak John. Kalau universitas terbuka yang kita miliki sekarang sudah berubah menjadi fisik. Mereka sudah pertemuan-pertemuan fisik dan punya gedung-gedung universitas. Ini sebaliknya, ini menjadi antitesis dari universitas terbuka.

Jadi saya kira Islamic University ini akan 100% daring, 100%. Kita sudah melakukan studi ebersama dengan Hankuk University Korea, yang memiliki sekolah online terbesar di dunia. Dan kita insyaallah September Pak, bulan ini sudah bisa menerima mahasiswa baru. Kepentingannya apa? Selain menjawab tantangan zaman sebagaimana Pak Iskan tadi sampaikan, ini untuk mengafirmasi lebih banyak pada terutama pada guru-guru madrasah sebagaimana amanat Undang Undang Pesantren. Guru-guru madrasah yang memiliki keterbatasan banyak hal, batas keterbatasan secara biaya, keterbatasan waktu, tempat, dan seterusnya. Sehingga mereka bisa memiliki kesempatan untuk kuliah melanjutkan studinya dengan cara murah dan mudah tanpa harus datang.

Saya membayangkan guru-guru madrasah sekarang yang tadi disampaikan siapa itu, gajinya hanya 200-300 ribu Pak sebulan. Untuk kuliah ya ngga mungkin Pak. Untuk beli beras saja kurang, bagaimana untuk kuliah? Nah *Cyber Islamic University* ini tetapi ada nama Islamnya, nama Indonesiannya itu. Itu nama kerennya saja Pak, nama Indonesia aja. Universitas Islam Siber Syekh Nurjati Indonesia. Itu Indonesiannya Pak, supaya agak keren diinggriskan dari tadi Pak.

Nah saya lanjutkan jadi guru-guru madrasah ini agar dia bisa belajar kuliah dari rumah saja. Dari rumah dan mereka mendapatkan gelar sarjana yang *recognize*. Jadi, iya gelar kesarjanaannya ini direkognisi karena sudah kita sudah urus semua legalitasnya dan PT semua sudah. Artinya rekognisinya dijamin. Jadi tinggal kita laksanakan. Itu untuk itu sehingga mereka memiliki gelar kesarjanaan ya tentu selain bisa meningkatkan pengetahuan, kesejahteraan mereka juga bisa ditingkatkan. Bukan hanya guru madrasah, TKI-TKI misalnya saudara-saudara kita itu yang di luar negeri, yang tidak memiliki kemampuan harus kuliah di luar negeri dia bisa kuliah di sini, di Universitas Siber ini. Karena memang kita dedikasikan ini untuk apa mengafirmasi saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan ya. Kekurangan dalam ekonomi, waktu, dan tempat itu Pak. Itu saya kira.

Kemudian soal bagaimana program yang bisa mempertemukan antara anggota yang terhormat dengan konstituen saya minta nanti Pak Sekjen dan kawan-kawan dirjen untuk mendalami dan memenuhi tadi yang disampaikan Pak Iskan ya. Mudah-mudahan bisa Pak dan saya kira juga tidak ada yang sulit untuk itu. Saya tahu saya mantan anggota DPR jadi ngerti perasaannya Pak. Jadi kalau tidak ada sakitnya itu di sini kata Bu Wulan. Sama, kira-kira sama. Ya itu saya kira.

Kemudian Pak Ace, terima kasih paparan-paparannya sangat menguatkan kami. Memang sangat penting itu ya, penguatan madrasah ini. Tetapi tentu kami melihat ini perlu tahapan. Jadi madrasah kan banyak sekali, dengan kemampuan anggaran kita yang sangat terbatas kemudian memasukkan semua madrasah ini dalam program prioritas itu tentu akan jadi beban tersendiri. Nah insya allah mudah-mudahan tahun depan kita bisa sisipkan ini untuk penganggaran madrasah ini. Memang sulit, kita sudah

bedah sebenarnya dengan Pak Dirjen Pendis ini terkait dengan madrasah. Bagaimana sulitnya mengelola madrasah dengan anggaran yang sangat terbatas. Kita khawatir kita tidak akan mampu menyentuh bukan hanya semua, sebagian besar saja kesulitan. Menyentuh sebagian besar saja kesulitan, apalagi semuanya karena keterbatasan anggaran. Nah kita coba takar kembali di pertemuan tripartit nanti, mudah-mudahan ada solusi yang lebih menggembirakanlah terkait dengan madrasah ini. Soal Cyber Islamic University saya sudah jawab.

Kemudian soal kenapa tidak merumpunkan saja gitu program strategis? Ini sebenarnya di awal sama pemikiran kita Pak Ace untuk menjadikan satu. Tapi kemudian kita break down karena kalau jadi satu ya kita tahu keterbatasan, satu ya keterbatasan sumber daya di Kemenag ini agak susah kalau dijadikan satu misalnya Cyber University dengan digitalisasi apa kementerian itu dijadikan satu itu ruwetnya minta ampun. Karena yang dikerjakan berbeda, yang dikerjakan berbeda. Memang kita harus pisahkan meskipun secara substansi ini sama. Ya urusannya ya virtual-virtual aja. Tapi memang beda, jadi universitas ini urusannya Pendis gitu, kemudian yang digitalisasi kita kasih ke HDI, Biro HDI untuk menjadi penanggung jawab dan di bawah Pak Sekjen. Jadi memang itu begitu situasinya.

Nah, kemudian soal kemandirian pesantren. Kemandirian pesantren sebagaimana sering kami sampaikan Pak Ace dan Bapak Ibu sekalian, saya membayangkan begini, pesantren itu kan hidup hari ini itu, hidup hanya tergantung pada dua hal. Rata-rata ya tidak semuanya. Rata-rata pesantren itu tergantung pada dua hal. Yang pertama pada kyainya, yang kedua pada wali santri. Rata-rata itu bergantungnya. Nah kyai itu dari mana? Kyai yang punya usaha, bagus, mending itu kan. Punya lahan pertanian yang luas, perkebunan atau usaha yang lain oke. Tapi rata-rata kyai ini tidak ada usahanya. Kyai itu lebih banyak yang kita kenal menjadi *mubaligh* dalam waktu yang sama. Jadi mengisi ceramah dari tempat ke tempat, ada bisyaroh kemudian dikumpulkan, dibelah dua, satu untuk istri, satu untuk pesantren, biasanya begitu. Itu abah saya dulu begitu Pak. Jadi dibelah dua, satu buat pesantren, satu buat istri gitu kan keluarga.

Tetapi dalam situasi pandemi ini kan semua terganggu, ngga ada lagi itu pengajian-pengajian, bisyaroh udah langka. Jadi *bisyaroh* itu kemewahan yang luar biasa hari ini. Sementara mengandalkan pada *syahriyah* atau SPP-nya santri itu orang tua santri itu hari ini juga pasti terganggu ekonominya, pandemi ini. Nah dari dua hal ini maka singkat saja berpikir ini harus satukan solusi. Solusinya apa? Memandirikan pesantren. Memandirikan pesantren itu mohon maaf Pak Ace bukan berarti mengabsenkan kehadiran negara, tidak. Tetapi bagaimana kita dorong pesantren ini agar mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Di saat yang sama tentu akan mengurangi *quote and quote* beban negara terhadap pesantren. Kita mengharapkan malah pesantren ini menjadi solusi atas bukan hanya dia sendiri tetapi juga ekosistem yang ada di dalamnya.

Ini kemandirian pesantren, maka dalam program kemandirian pesantren ini Bapak Ibu sekalian di Kementerian Agama merumuskan mulai dari *mapping* kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh sebuah pesantren dalam memandirikan dirinya. Jadi tidak asal-asalan. Kita akan bantu pesantren itu memetakan, pesantren ini punya kemampuan apa sih? Apakah bertani, berdagang, atau hanya berjual jasa, atau apa? Kita akan bantu didampingi itu. Kemudian setelah itu kita lakukan pelatihan. Setelah ketemu gitu, apa kira-kira mau dikerjakan, kita berikan pelatihan, setelah pelatihan kita kasih modal dan pendampingan, setelah itu pemasaran. Kita kawal terus ini. Kita kawal dari hulu ke hilir. Jadi tidak seperti yang sebelumnya, kebanyakan program-program untuk pesantren itu hanya diberikan berupa kalau tidak pelatihan saja, ya kasih uang saja. Sehingga pelatihan itu akan menguat karena nanti nggak modalnya, yang diberikan pun tidak akan bisa digunakan maksimal karena nggak ngerti basisnya. Basis ini untuk apa? Nah kita selesaikan ini dari hulu-hilir agar pesantren-pesantren ini bisa.

Nah kita sudah mulai percontohan berapa pesantren, 100 ya? Pilot di 100 pesantren tahun ini, *piloting* di 100 pesantren. Nah target kita sampai 2024 itu 5000 pesantren. Nah di sini Pak Ihsan mungkin sedikit menjawab tadi bagaimana cara menyambungkan itu. Tapi itu target ya selama 2024 jadi akan ketemu nih nanti cara menyambungkan lidah Komisi VIII dengan konstituen ini. Ini salah satu Pak, ini salah satu. Nah salah dua, salah tiga, pasti ada nanti. Itu kira-kira soal kemandirian pesantren. Soal pembagian anggaran Pak Ace, Pak Sekjen nanti bisa membantu menjawab ya soal pembagian anggarannya.

Lalu Bang Marwan, nah PTKIS ini sebenarnya sudah ada afirmasi dari kita ya. Tapi memang tidak besar. *Refocusing*, kita sudah atur mau nanti dialami di, bersama eselon 1 sudah dilaporkan ke saya dan intinya ini menjawab Pak Iskan juga tadi itu, Pak Iskan Qolba terjawab juga. Ini mudah-mudahan sekali lagi karena politik anggaran kita yang, yang masih lemah gitu ya.

Baik itu Bu Diah, terima kasih masukannya. Jadi betul bahwa politik anggaran kita ini membuat kita ini serba tanggung. Betul itu Bu. Serba tanggung, pas Ratas terakhir saya juga sudah sampaikan ini terkait keterbatasan di Kementerian Agama tetapi di satu sisi kan situasi ini juga agak sulit Bu. Pandemi ini agak sulit kita mem-*push* supaya kita mendapatkan anggaran yang paling tidak optimal lah kalau nggak maksimal. Ini agak sulit, saya kira ini mohon ya mohon apa ya bukan pemakluman sih kita ini sama-sama mengerti, sama-sama mengerti tapi kita akan terus, saya kami di Kementerian Agama ndak berhenti untuk selalu komunikasi dengan Menkeu dengan kementerian yang lainlah untuk terkait dengan penganggaran ini. Ya memang ada yang berhasil, ada yang tidak itu proses.

Saya kira mudah-mudahan tadi aman ada Pak Ketua, bisa kita wujudkan di pertemuan tripartit nanti. Terima kasih ini yang bisa saya jawab Pak Ketua, pimpinan, dan para anggota yang terhormat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. (02:01:16)

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Menteri, yang sudah menjawab pertanyaan, saran ataupun masukan dari masing-masing fraksi termasuk dari meja pimpinan.

Sekarang kita akan memasuki agenda berikutnya yaitu pembacaan draf kesimpulan dan sekali lagi para anggota, agenda kita pendalaman itu hari Senin, jam 10 ya. Jam 10 bersama para dirjen dan sekjen. Mungkin usulnya tidak sekaligus karena waktunya nggak cukup kalau semua sekaligus kayak Kemensos kemarin, mungkin seperti di Kopo kemarin kita bagi per klaster ya. Sehingga dari pagi mungkin sampai jam 4 sore ya. Pak Marwan, hari Senin itu.

Ya, jadi tolong kehadirannya hari Senin, ada beberapa dirjen ini, Pak Sekjen juga, mungkin dari jam 10 sampai jam 4 sore. Kita siapkan waktu. Karena kalau jam pagi sampai siang nggak akan cukup ya. Maka mohon masing-masing kapoksi memastikan ada perwakilan masing-masing fraksi, ya. Untuk hari Senin Pak John, dari jam 10 sampai jam 4 sore.

F- P. GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Izin ketua, pertama tentang pertanyaan saya tadi. Bukan, bukan, saya perlu di-clear-kan juga gitu lho ya. Seolah-olah saya betul-betul saya tidak tahu apa yang saya tanyakan tadi itu sudah ditanyakan dua hari, tiga hari yang lalu. Karena saya tapi saya sama pimpinan. Saya sudah izin dua hari ini saya nggak ikut.

KETUA RAPAT:

Tapi hikmahnya ada, Pak John nanya itu ada perintah kita ke sekretariat, jadi apapun keputusan di sini mesti disampaikan.

F- P. GOLKAR (H. JOHN KENEDY AZIS, S.H.):

Tapi bisa juga di kupas di dalam artinya kita ramai-ramai ini ini sudah dipertanyakan gitu kan ya. Saya paham betul sih itu dan saya sudah tetua Ketua. Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi tolong sekali lagi sekretariat, semua hasil keputusan itu disampaikan ke anggota yang hadir maupun tidak hadir. Ya. Karena supaya ada kesinambungan.

Baik kita akan membacakan draf, mohon disimak bilamana nanti ada perubahan atau usul nanti akan kami beri kesempatan.

**DRAFT KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2021-2022
KAMIS, 2 SEPTEMBER 2021**

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda pembahasan RKA K/L Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022 disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami Pagu Anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp66.453.208.486.000 yang dialokasikan untuk program unit eselon 1 sebagai berikut, sebagaimana di tabel, dengan total 1-11 ada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Bimas Islam, Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh, Badan Litbang dan Diklat, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, dengan total sebagaimana saya sebutkan tadi Rp66.453.208.486.000.
2. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Pagu Anggaran pada RKA K/L Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 bersama pejabat eselon 1. Yang tadi saya sampaikan Senin jam 10 sampai jam 4 sore.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan, ini hanya mengulang kesimpulan yang lalu, untuk mempertegas. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.514.205.704.939 dengan rincian sebagai berikut. Teruntuk sama 1-11 Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Islam, Badan Litbang dan Diklat, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Dirjen Bimas Budha, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Total tadi sudah saya sebutkan, Rp11.514.205.704.939.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII sebagai berikut:

- a. Menyampaikan data pendukung lebih rinci mengenai program *Cyber Islamic University*. Tadi sudah disampaikan Pak Menteri tapi biar kita dapat gambaran lebih jelas, nanti mungkin Pak Dirjen Pendis ini yang lebih berkompeten di pendalaman nanti.
- b. Mengoptimalkan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas guru agama. Ya ini penting Pak Menteri. Yang mengusulkan pemda, Kemendikbud, yang menentukan Menpan, jadi memang Kementerian Agama tidak punya peran. Kalau bisa diambil alih juga Pak.
- c. Meningkatkan anggaran untuk peningkatan kualitas sarana prasarana madrasah dan pencapaian program kemandirian pesantren. Targetnya sampai 2024 5000 tadi.
- d. Berkoordinasi dengan Kementerian PUPR dalam upaya mengembalikan program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pesantren ke Kementerian Agama Republik Indonesia.

Itu Bapak Ibu dari kami sebagai draf, kami persilakan dari Pimpinan dan Anggota, sebelum saya persilakan Pak Menteri. Silakan anggota atau pimpinan, ada? Silakan Bu Diah.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PDI PERJUANGAN (DIAH PITALOKA, S. Sos. M.Si.)

Terima kasih. Saya menyambut baik ide Pak Menteri tentang digitalisasi platform digital ya Pak ya. Nah ini ke depan memang maksud saya Kementerian Agama ini tentu akan bertransformasi nanti ke dalam platform digital. Kebayang saya tidak hanya pendidikan Islam, tapi disemua ranah pelayanan kehidupan umat beragama. Nah mungkin boleh juga nanti Pak Menteri bikin Renstra, karena saya rasa tahapan-tahapan ini kan gak bisa programatik tapi harus ada Renstranya, pendekatan strategisnya dan waktu transformasinya ini akan jadi satu hal yang menurut saya menarik gitu ya.

Juga kita bahas ada satu kementerian ya ini yang mitra Komisi VIII ya, bagaimana nanti platform digital ini yang kata Pak Menteri kita gak mungkin kembali lagi gitu kan ke analog. Kita akan masuk ke dalam satu konstruksi platform digital dalam pelayanan kehidupan umat beragama. Nah ini menurut saya di semua sendinya dimulai dimitigasi Pak, termasuk juga nanti disitu pasti ada kalkulasi SDM. Karena hari ini beban SDM Kementerian Agama itu dengan ruang geraknya itu jadi sangat terbatas gitu. Nah ini mungkin nanti akan bisa masuk kedalam perkiraan anggaran di depan gitu, dengan adanya perubahan terhadap platform transformasi terhadap platform digital ini Pak Menteri. Nah mungkin itu yang ingin saya respon dari Pak Menteri tadi. Terima kasih.

Nah menyangkut anggaran, ya kesimpulan ya, iya kesimpulan anggaran tambahan itu saya rasa Pak Menteri sudah memitigasi atau mengecek apa-apa yang urgent, sehingga muncul angka 11 triliun itu Pak. Nah jadi itu menurut saya harus kita ya upayakan. Karena sifatnya akan jadi kepentingan yang sangat mendasar apabila itu tidak terpenuhi akan jadi ada dampaknya gitu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, makasih Bu Diah. Dari anggota ada? Pak Iskan silakan Pak Iskan.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Ya, yang pertama tentang program digitalisasi itu banyak seperti program pencitraan ya. Karena sebetulnya dia akan mempengaruhi kepada sistem anggaran. Otomatis IAIN itu nggak perlu bangun gedung lagi karena nanti murid itu nggak 6 hari lagi di kuliah bisa *change*, bisa gantian. Jadi gedung itu sudah fungsinya berkurang. Seriusnya Pak Ketua itu berpengaruh kepada anggaran. Karena digitalisasi itu kan mengoptimalkan ini. Ini yang belum terlihat saya lihat. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya minta tadi Pak Menteri itu membuat politik anggaran itu bukan sifatnya angin-angin surga, ya. Nanti Sekjen mengatakan begini ini. Maksudnya riil gitu, jadi anggaran yang 3 triliun itu 500 M dialihkan ke pesantren gitu maksud saya. Kalau nanti hari Senin itu tidak ada politik anggaran lagi, cuma *cawe-cawe* aja nanti itu. Jadi saya mintanya hari ini Pak Ketua, politik anggarannya ada kalau nggak cuma kita *fotocopy* aja dari menteri. Itu maksud saya. Harus ada politik anggarannya, bukan janji gitu saya nggak. Ini mau dicantumkan disaran pendapat pimpinan komisi dan anggota? Atau?

Maksudnya Pak Ketua, kalau dia kan masih satu dirjen, nggak masalah kan? Menteri Keuangan setuju aja. Tidak mengalihkan ke. Jadi di dirjen mana tadi tuh tentang masalah 3,2 triliun tadi, 500 M dialihkan ke pesantren aja gitu. Sederhana aja kok. Program moderasi beragama ini, ini kan ujung-ujungnya ceramah aja ini, ya kan. Ini kita 500 M itu kita alihkan ke pesantren aja yang riil gitu Pak Ketua. Itu di, madrasah. Biar ada politik anggaran yang konkret. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak Iskan belum ini?

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Boleh membantu Pak Iskan? Begini Pak, jadi kalau sebuah satu politik anggaran itu ketika tidak dituangkan dalam sebuah narasi angka kan masih angin surga itu. Nah makanya mengusulkan supaya anggaran yang terkait dengan moderasi agama yang 1 triliun berapa tadi? 3 triliun itu, bisa *nggak* langsung di-split 500-700 miliar untuk bantuan madrasah-pesantren swasta? Misalnya gitu. Ini jelas gitu ya. Bukan masuk ke dalam penambahan ini. Ini barang lain lagi ini sudah, tapi masuk ke dalam satu kebijakan, pergeseran gitu lho. Terima kasih. Itu maksudnya.

KETUA RAPAT:

Ya itu nanti kita tunggu jawabnya di eselon 1 ya. Realisasinya di situ nanti kan, hari Senin itu bisa *nggak* Pak Sekjen atau.

F- P. GOLKAR (Hj. ENDANG MARIA ASTUTI, S.Ag., SH., MH.):

Mestinya dicatat dimasukan di poin..

KETUA RAPAT:

Oke, karena sekarang kita membahas draft, itu di mana nyantolnya coba?

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Di poin 3 kan? Poin 3 sudah ada soal madrasah. Meningkatkan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana madrasah.

KETUA RAPAT:

Sudah ada, tapi tadi mau disebut angka gimana tuh Pak Bukhori atau Bu Endang gimana?

F- PKS (K.H. BUKHORI, Lc., M.A.):

Yang dari halaman 9 tadi. Supaya bisa menjadi payung untuk pembahasan hari Senin.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Nomor 3 itu udah bagus tapi kan belum ada angkanya.

KETUA RAPAT:

Ya makanya bisa lihat di mana?

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Di situ. Dan digeser 500 M gitu aja. Tambah aja.

WAKIL KETUA KOMISI VIII/ F- PG (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si):

Ini masalahnya Pak Iskan, memang kalau kita mau merombak secara umum dari angka nomor 2 itu, itu kan harus dipretelin lagi satu persatu. Nah kita pun juga belum tahu yang dimaksud dengan program konkret dari moderasi beragama itu apa saja kan gitu. Di sini kan nggak ada nih, belum ada gitu ya. Untuk itu kita preteli pada saat kita dengan eselon 1. Jika nanti dalam proses pembahasannya.

F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):

Yang penting kita sepakat dulu gitu Ketua..

KETUA RAPAT:

Jadi hari Senin itu. Apa itu barangnya kan keliatan nanti. Kalau sekarang masih disembunyikan, ntar dulu, kalau kelihatan langsung nggak enak musti pelan-pelan. Baik, ada yang lain? Pak Menteri ada saran?

F- PDI PERJUANGAN (I KOMANG KOHERI, S.E.)

Boleh pimpinan? Dikit. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Menteri yang kami hormati, pimpinan yang kami banggakan.

Pak Menteri, ini cuman tidak mengurangi kesimpulan ini ke depan komposisi daripada anggaran untuk Hindu, Kristen, Katolik, dan Budha ini, ini

tiap tahunnya tidak ada peningkatan anggaran, dan karena secara perhitungan kalau secara prosentase ini kita ini berhitungnya kan karena Dirjen Bimas Islam dan Pendis ini dipisahkan. Sedangkan untuk Dirjen Hindu dan Katolik dan Budha ini kan sendiri. Ini mohon nanti kalau ke depan ini dengan Kementerian Keuangan ataupun, ini mohon untuk dirjen-dirjen dari di luar agama Islam ini, ini ditingkatkan untuk jumlah anggarannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dari anggota masih ada? Silakan Pak Menteri. Ada? Cukup? Kalau Pak Komang tadi di setiap dirjen yang untuk tambahan kita setuju Pak. Termasuk Dirjen Hindu, Budha, Katolik, tadi ada di yang nomor 2, kita setuju Pak. Tinggal lebih Pak Menteri dan Banggar Komisi VIII nanti forum besar ya. Mudah-mudahan nanti disetujui semua dan tidak ada yang kita tidak setuju Pak. Semua dirjen kita setuju Pak.

Baik, Bapak Ibu draf sudah saya bacakan, tadi ada penguatan makna tanpa merubah dari redaksi, tidak perlu bacakan lagi. Apakah draft yang saya bacakan bisa kita sepakati sebuah kesimpulan dalam Rapat Kerja hari ini? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik. Sebelum ditutup, kita sudah sampai di penghujung raker, kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan kata akhir dari rapat kerja hari ini. Silakan Pak.

MENTERI AGAMA (YAQUT CHOLIL COUMAS):

Terima kasih Ketua.

Para pimpinan dan seluruh anggota Komisi VIII DPR yang terhormat.

Terima kasih hari ini rapatnya sangat produktif dan luar biasa sekali dan mudah-mudahan nanti di hari Senin pendalaman juga akan semakin memperjelas dan mempertegas apa yang akan kita lakukan melalui Kementerian Agama ini untuk kepentingan bangsa dan negara tentu saja. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan seluruh tenaga serta pikiran Bapak Ibu sekalian di rapat kita hari ini. Terima kasih Ketua dan pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Terima kasih para pimpinan Komisi VIII dan seluruh anggota Komisi VIII baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Kami tegaskan kembali mohon masing-masing Kapoksi memastikan ada perwakilan masing-masing Fraksi di hari Senin tanggal 6 September 2021 mulai jam 10 sampai jam 4 sore kita akan melakukan pendalaman dengan eslon 1 Kementerian Agama membahas RKA K/L.

Dengan berakhirnya rapat ini maka saya nyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah..

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL:12.33 WIB)

**Jakarta, 2 September 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 197309261997031001**